

Buku Pintar Data Statistik Sektor Kabupaten Pacitan

2023



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur Kehadirat Allah Yang Maha Esa, penyusunan Buku Pintar ini telah selesai sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bekerja sama dengan CV Nabila Zafira Mahalia (NaZMa Office) telah melakukan pengambilan Metadata Statistik Sektor OPD yang ada di Kabupaten Pacitan. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata statistik sektoral juga berkerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.

Metadata kegiatan statistik adalah sekumpulan atribut informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan statistik. Tujuan buku ini adalah menggabungkan data statistik sektoral Kabupaten Pacitan yang menjelaskan seluruh proses dalam merancang publikasi ini, mulai dari perencanaan kegiatan pengumpulan data hingga rekapitulasi hasil pengumpulan data. Publikasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan yang dapat digunakan untuk evaluasi, pemantauan, dan perencanaan kegiatan di masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim teknis dan berbagai pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik sehingga buku ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat berguna untuk perencanaan di Kabupaten Pacitan.

Pacitan, Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Bambang Marhaendrawan, S.Pt., M.M.

NIP. 19680920 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan Penelitian	7
1.3 Lingkup Penelitian	9
1.4 Sistematika Laporan.....	13
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	15
2.1 Perencanaan Kegiatan	16
2.2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Metadata	16
2.3 Kendala dan Solusi yang Dilakukan	17
BAB III RINGKASAN HASIL	18
Buku Pintar Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan	19
BAB IV PENUTUP	187
4.1 Kesimpulan	188
4.2 Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA	190

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan Satu Data pada tahun 2019 untuk memastikan bahwa setiap kegiatan statistik di wilayah Indonesia didokumentasikan secara lengkap dan terintegrasi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas data dan memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Upaya untuk menyelaraskan aktivitas statistik di Indonesia juga diatur melalui peraturan skala nasional maupun regional. Sebagai contoh, Undang - Undang Nomor 16 tahun 1997 mengatur tentang penyelenggaraan statistik nasional secara terpadu untuk membentuk Sistem Statistik Nasional (SSN) yang handal, efektif, dan efisien. Undang - undang ini juga sekaligus menggantikan sistem sensus dan statistik yang tidak lagi sesuai dengan situasi saat ini, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, dokumentasi statistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Dokumentasi statistik yang lengkap dan terstruktur dapat membantu meningkatkan efektivitas kebijakan yang didasarkan pada data. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asra (2017), dokumentasi statistik yang lengkap dan terstruktur sangat penting untuk mendukung kebijakan publik. Informasi dokumentasi statistik dapat dituangkan dalam bentuk metadata.

Metadata dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi yaitu jenis kegiatan dan jenis metadata. Jenis kegiatan statistik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terdiri dari statistik dasar, sektoral, dan khusus. Jenis metadata dapat berbentuk deskriptif, teknis/struktural, dan administrasi. Metadata dapat meningkatkan efisiensi persiapan, penyimpanan, akses, pengelolaan dan penyebarluasan data untuk produk statistik yang dihasilkan di seluruh organisasi (OECD, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi yang lengkap dan terstruktur dapat membantu meningkatkan kualitas data dan meminimalkan

risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Metadata dalam proses produksi statistik juga mendukung integrasi data dari berbagai sumber, memfasilitasi analisis dan interpretasi data, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas statistik (Dipo, 2000). Meskipun kebijakan Satu Data telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong implementasi dokumentasi statistik yang komprehensif, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk Kabupaten Pacitan di Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan Satu Data. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya aksesibilitas data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan Satu Data di Kabupaten Pacitan dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa depan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan Satu Data dan dokumentasi kegiatan statistik di Indonesia. Dalam proyek dokumentasi Satu Data di Kabupaten Pacitan, BPS turut berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat untuk mengimplementasikan kebijakan Satu Data dan mendokumentasikan kegiatan statistik di daerah tersebut.

BPS memiliki misi untuk memperkuat SSN secara berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Statistik. SSN merupakan tatanan yang saling berkaitan dan menjadi tanggung jawab BPS sebagai pembina dan koordinator statistik nasional. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 adalah menerapkan penyelenggaraan statistik yang andal, efektif, dan efisien, dengan menetapkan tugas dan tanggung jawab BPS sebagai pembina koordinator statistik skala nasional dan mengatur tentang pengumpulan, penyediaan, penyebarluasan, dan perlindungan data statistik termasuk dalam hal sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Satu Data dapat memberikan manfaat signifikan bagi pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Misalnya, berdasarkan Sekretariat Satu Data Indonesia (2020) menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data telah berhasil meningkatkan kualitas data, mempermudah akses data bagi pengambil keputusan, dan mendorong kolaborasi antar instansi pemerintah di Indonesia. Selain itu, BigBox (2020) menemukan bahwa kebijakan Satu Data berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, proyek dokumentasi Satu Data di Kabupaten Pacitan juga menghadapi beberapa tantangan dan masalah. Misalnya, keterbatasan sumber daya manusia dan teknis di OPD setempat dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, BPS bekerja sama dengan OPD setempat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan memastikan bahwa buku dokumentasi Satu Data di Kabupaten Pacitan dapat mencapai standar kualitas yang diperlukan.

Dalam kesimpulannya, keterlibatan BPS dalam proyek dokumentasi Satu Data di Kabupaten Pacitan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas data statistik di daerah tersebut. Studi-studi sebelumnya menunjukkan manfaat yang signifikan dari implementasi kebijakan Satu Data, dan proyek dokumentasi Satu Data di Kabupaten Pacitan dapat memberikan kontribusi yang sama dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah di tingkat lokal, sehingga menciptakan masyarakat Pacitan yang sejahtera dan bahagia.

1.2 TUJUAN PENELITIAN

Manfaat metadata kegiatan statistik yang tercatat dengan baik akan bermanfaat bagi banyak pihak, yaitu:

a. Penyedia Data

1. Memberikan informasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS pada kelompok statistik dasar maupun oleh kementerian / lembaga pada kelompok statistik sektoral, serta intitusi nonkementerian / lembaga pada kelompok

statistik khusus. Hal ini juga didukung dengan adanya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kegiatan.

2. Menjadi media untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan statistik. Melalui informasi yang tersedia, maka penyedia data dapat mengoptimalkan untuk memanfaatkan hasil kegiatan statistik yang telah ada dibandingkan dengan melakukan kegiatan statistik yang sama.
3. Menjadi dokumentasi informasi data yang telah dikumpulkan oleh penyedia data.

b. Pengguna Data

1. Memberikan kemudahan dalam pencarian maupun evaluasi informasi baik dari dalam maupun luar organisasi, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, memudahkan dalam menggunakan data agar sesuai dengan yang diperlukan, memudahkan dalam mengidentifikasi bagaimana data tersebut diperoleh, dihitung dan diestimasi.
2. Memberikan kemudahan bagi pengguna data dalam menentukan pilihan sumber data yang akan digunakan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan kualitas pengumpulan, metodologi dan pengolahan data.
3. Membantu dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan statistik yang diperlukan, khususnya dalam melakukan dan mengembangkan penelitian. Informasi yang ada dapat membantu pengguna data dalam melakukan perancangan kegiatan survei maupun studi.

c. Organisasi/institusi

1. Berguna untuk memudahkan pengelolaan data sebagai investasi organisasi.
2. Menjadi media dokumentasi tahapan pengelolaan data, pengendalian mutu, definisi, penggunaan data, keterbatasan, dan sebagainya.
3. Memudahkan mengingat keberadaan data sehingga menghemat waktu dan biaya media promosi yang menjelaskan serangkaian data dalam sebuah katalog referensi pembagian data keluar yaitu sebagai penjelasan untuk dimengerti orang lain secara benar.
4. Membantu instansi lain yang berpotensi menggunakan data.

1.3 LINGKUP PENELITIAN

a. Lingkup Regional

Penelitian dokumentasi Satu Data dilakukan di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di pesisir selatan Jawa Timur, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 kecamatan, dengan total luas wilayah sebesar 1.389,87 km² (BPS Pacitan, 2022).

Penelitian ini akan memfokuskan pada kegiatan statistik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pacitan, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan data Satu Data di setiap OPD.

a. Lingkup Pengumpulan Data

Bagian tulisan ini akan memaparkan tentang metadata yang didokumentasikan. Legwaila (2012) menyebutkan bahwa metadata merupakan deskripsi tentang bagaimana sebuah data diproduksi. Penelitian ini akan mendokumentasikan dua belas metadata untuk setiap kegiatan statistik yang berlangsung di masing – masing OPD, meliputi:

1. Kode Data

Kode data adalah informasi yang menunjukkan bahwa kegiatan sudah mendapat rekomendasi dan metadata kegiatan statistik sudah terdaftar di pusat. Kode data yang akan didokumentasikan dalam proyek ini bersumber dari pusat dan berupa kode kegiatan statistik yang terkait dengan Pacitan.

2. Nama Data

Nama data yang akan didokumentasikan adalah nama yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik disertai dengan tahun kegiatan. Nama data akan mencakup informasi mengenai jenis kegiatan statistik yang dilakukan, seperti survei, sensus, atau studi kasus.

3. Unit Kerja Penghasil

Unit kerja penghasil adalah bidang yang menangani data tersebut. Unit kerja yang akan didokumentasikan dalam proyek ini mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pacitan.

4. Definisi

Definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Dalam proyek ini, definisi akan mencakup penjelasan mengenai variabel atau indikator yang diteliti dalam kegiatan statistik.

5. Level Estimasi

Level estimasi adalah informasi mengenai tingkat penyajian hasil yang akan dilakukan, apakah nasional, provinsi, kabupaten/kota, atau level administrasi lainnya. Dalam proyek ini, level estimasi akan mencakup tingkat estimasi hasil kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan.

6. Rumus Perhitungan

Rumus perhitungan adalah metode atau rumus penghitungan indikator yang merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk menghitung suatu indikator yang dihasilkan dalam kegiatan statistik. Dalam proyek ini, rumus perhitungan akan dicatat untuk setiap variabel atau indikator yang diteliti dalam kegiatan statistik.

7. Input/Variabel Pembentukan Indikator

Input/variabel pembentukan indikator adalah variabel yang menyertai rumus perhitungan. Dalam proyek ini, input/variabel pembentukan indikator akan dicatat untuk setiap variabel atau indikator yang diteliti dalam kegiatan statistik.

8. Ukuran

Ukuran adalah unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Dalam proyek ini, ukuran akan mencakup satuan yang digunakan dalam pengukuran variabel atau indikator yang diteliti dalam kegiatan statistik.

9. Satuan

Satuan yang dimaksud merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Dalam proyek ini, satuan akan mencakup satuan yang digunakan dalam pengukuran variabel atau indikator yang diteliti dalam kegiatan statistik.

10. Referensi Waktu

Referensi waktu variabel merupakan batasan waktu yang digunakan untuk mendefinisikan waktu pengumpulan data pada kegiatan statistik. Batasan waktu tersebut didefinisikan dalam satuan variabel yang dikumpulkan. Referensi waktu ini dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, seperti saat pencacahan, pengumpulan data dalam satu bulan terakhir, satu tahun terakhir, atau periode waktu lainnya. Informasi tentang referensi waktu sangat penting untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam data.

11. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada jenis langkah atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data pada kegiatan statistik. Metode ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, seperti survei, pencatatan administratif, atau pengamatan langsung. Metode pengumpulan data yang tepat akan memastikan kualitas data yang dikumpulkan dan keakuratan hasil statistik yang dihasilkan. Oleh karena itu, dokumentasi tentang metode pengumpulan data perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan hasil statistik.

c. Manfaat Penelitian

Dengan keberadaan dokumentasi kegiatan statistik yang di himpun dari berbagai OPD di Pacitan, diharapkan mendatangkan banyak manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh meliputi:

1. Meningkatkan kualitas data statistik di Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan semua kegiatan statistik yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Pacitan. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan statistik tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik di Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat

membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan akurat berdasarkan data yang tersedia.

2. Memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan di Kabupaten Pacitan. Dengan adanya dokumentasi yang lengkap mengenai kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan, pemerintah daerah akan memiliki informasi yang lebih baik dan akurat dalam mengambil keputusan dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Dokumen tersebut dapat menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dokumentasi yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memonitor kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan obyektif.
4. Sebagai sumber data bagi penelitian dan pengembangan di masa depan. Dokumentasi yang lengkap mengenai kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan dapat menjadi sumber data yang berharga bagi penelitian dan pengembangan di masa depan. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian dan pengembangan kebijakan di berbagai bidang, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
5. Menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi kebijakan Satu Data. Penelitian ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam implementasi kebijakan Satu Data. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan, diharapkan dapat memotivasi daerah lain untuk melakukan hal yang serupa dalam upaya meningkatkan kualitas data statistik dan pengembangan kebijakan berbasis data.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika dalam penulisan Buku Pintar Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Penelitian

1.3 Lingkup Penelitian

1.4 Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Perencanaan Kegiatan

2.2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Metadata

2.3 Kendala dan Solusi yang Dilakukan

BAB III RINGKASAN HASIL

Buku Pintar Data Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

PELAKSANAAN KEGIATAN



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Perencanaan Kegiatan

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan pendekatan wawancara yang ditunjukkan kepada OPD di Kabupaten Pacitan. Adapun poin – poin pertanyaan yang ditanyakan sudah dijabarkan pada bagian tulisan sebelumnya. Sesi wawancara dilakukan pada 4-5 April 2023 yang bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Durasi pelaksanaan berlangsung selama 2 hari.

Tahapan lanjutan dari pengumpulan data dilakukan secara asinkronus melalui media *google form*. OPD yang berperan sebagai narasumber akan memberikan informasi yang kurang lengkap atau belum terjawab dari sesi wawancara sebelumnya. Adapun pelaksanaan pengisian formulir berlangsung dari 4 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023.

2.2 Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Metadata

Secara umum hasil yang dicapai dari survei Metadata kegiatan Statistik di Kabupaten Pacitan adalah 26 OPD yang berhasil diwawancarai. Berikut hasil pengumpulan dan entri metadata Kabupaten Pacitan:

No	Nama OPD	Jumlah Metadata
1.	Dinas Pendidikan	44
2.	Dinas Kesehatan	29
3.	Dinas PUPR	10
4.	Dinas Perkimkan	15
5.	Dinas Satpol PP	9
6.	BPBD	2
7.	Dinas Sosial	8
8.	Dinas PPKB PPPA	22
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13
10.	Dinas Lingkungan Hidup	8
11.	Dinas Dukcapil	7

12.	Dinas PMD	5
13.	Dinas Perhubungan	6
14.	Dinas Kominfo	5
15.	Dinas Koperasi, UM dan Perindustrian	3
16.	Dinas PMPTSP	2
17.	Dinas Parbudpora	17
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2
19.	Dinas Perikanan	12
20.	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	30
21.	Setda	4
22.	Set DPRD	1
23.	Bapeddalitbang	7
24.	BKD	2
25.	BKPSDM	7
26.	Inspektorat	2
27.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4

2.3 Kendala dan Solusi yang Dilakukan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengumpulan data. Bagian ini akan menjelaskan tentang kendala dan solusi yang dilakukan. Mengetahui tentang batasan dan cakupan juga memiliki urgensi untuk perbaikan di penelitian selanjutnya. Kendala yang ditemui meliputi:

- a. Perbedaan perwakilan dari beberapa OPD yang hadir pada hari diskusi dan briefing dengan hari pelaksanaan sehingga memunculkan kesenjangan pemahaman antara pewawancara dan pihak OPD.
- b. Beberapa pihak OPD tidak menyiapkan data yang seharusnya harus disiapkan.
- c. Kesulitan dalam menemui responden yang bertanggungjawab secara langsung dalam kegiatan statistik kabupaten Pacitan sehingga sulit untuk menanyakan pertanyaan lanjutan atau informasi yang lebih detail.

Sebagai upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut, terdapat solusi yang dilakukan dan ditawarkan untuk pelaksanaan pendataan lanjut. Adapun berikut solusi yang ditawarkan:

- a. Mengadakan sesi pengumpulan data lanjutan yang dilaksanakan secara daring.
- b. Membuat dan memberikan panduan secara rinci tentang konstruk atau informasi yang ditanyakan untuk kepentingan pengumpulan data.
- c. Mendampingi pengisian kuesioner dengan memberikan informasi yang dapat dihubungi jika menemukan kendala atau kebingungan.
- d. Membangun komunikasi dengan responden agar terdapat kesamaan pemahan persepsi dan menghindarkan dari kesalahpahaman.

RINGKASAN HASIL



BAB III
RINGKASAN HASIL

3.1 DINAS PENDIDIKAN

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase ruang kelas sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten
Konsep/Definisi	Persentase bangunan ruang kelas sekolah SMP dalam kondisi bangunan baik.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sekolah dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh kondisi bangunan sekolah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ruang kelas SMP kondisi baik • Jumlah seluruh ruang kelas SMP
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi Dapodik/Emis
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase bangunan ruang kelas sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten
Konsep/Definisi	Persentase bangunan ruang kelas sekolah SD dalam kondisi bangunan baik.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ruang kelas SD kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh ruang kelas SD}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah ruang kelas SD kondisi baik • Jumlah seluruh ruang kelas SD

Ukuran	Persentase
Satuan	Perse
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Melek huruf merupakan kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Analisa yang akan dilihat yaitu perbandingan angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Angka Melek Huruf Perempuan}}{\text{Angka Melek Huruf Laki} - \text{Laki}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Data Angka Melek Huruf latin Berdasarkan Gender
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	
Kode Data	-

Nama Data	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah SD dan SMP seajar}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7 - 12 th}} \times 10.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Data Ruang Kelas, Data Penduduk usia 7-12 tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Perbandingan antara jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru pada jenjang pendidikan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan guru terhadap rombel pada pendidikan tertentu
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah guru SD dan SMP seajar}}{\text{Jumlah murid SD dan SMP seajar}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Data Guru dan data Murid
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan

Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD)	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Perbandingan antara jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Bertujuan untuk melihat gambaran umum kecukupan guru SD sesuai dengan jumlah rombel.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah guru SD}}{\text{Jumlah murid SD}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Data Guru dan Data Rombel
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Perbandingan antara jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Bertujuan untuk melihat gambaran umum kecukupan guru SMP sesuai dengan jumlah rombel.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah guru}}{\text{Jumlah murid SMP}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Data Guru dan data Murid
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan

Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rasio APM perempuan/laki-laki	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio APM perempuan/laki-laki
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Rasio APM perempuan/laki-laki digunakan untuk melihat gambaran umum partisipasi siswa perempuan sesuai jenjang
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{APM \text{ Perempuan}}{APM \text{ laki} - \text{laki}} \times 10.000$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data Murid Perempuan • Data Murid Laki-laki
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Adalah banyaknya murid kelas 1 yang berhasil menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar pada tahun tertentu yang berusia 12 tahun.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah murid yang tamat SD}}{\text{Banyaknya penduduk usia 12 tahun}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data murid yang tamat SD • Banyaknya penduduk usia 12 tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan

Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Kode Data	-
Nama Data	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan anak dari sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pembinaan ini dilakukan sebagai bantuan perkembangan rohani dan jasmani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Selain itu Pendidikan di usia dini dapat menstimulus perkembangan emosional anak dan intelektual anak.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Variabel Pembentuk Indikator	Data murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan tembal balik antara perkembangan kependudukan. Oleh karena itu,

	stakeholder dan mitra kerja di daerah wajib untuk mengimplementasikan kerjasama pendidikan kependudukan baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Penjumlahan sekolah yang melaksanakan pendidikan kependudukan
Variabel Pembentuk Indikator	Data sekolah yang melaksanakan pendidikan kependudukan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan suatu metode pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Ekonomi}} \times 100\%$ <p>dimana,</p> $I_{Kesehatan} = \text{Indikator kesehatan}$ $I_{Pendidikan} = \text{Indikator Pendidikan}$ $I_{Ekonomi} = \text{Indikator Ekonomi}$
Variabel Pembentuk Indikator	Indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi.

Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
Kode Data	-
Nama Data	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Kualifikasi guru adalah suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Kualifikasi merupakan keahlian yang diperlukan untuk menduduki suatu jabatan. Kualifikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran ¹
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pendidik dan tendik yang berijazah S1 atau DIV}}{\text{Jumlah pendidik atau tendik}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pendidik atau tendik yang berijazah S1 atau DIV • Jumlah Pendidik atau Tendik
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	
Kode Data	-
Nama Data	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat untuk melihat gambaran umum usaha kesehatan sekolah dasar. Merupakan suatu upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Data UKS yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa}}{\text{Data seluruh UKS}} \times 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data UKS yang melaksanakan kegiatan penjangkaran kesehatan • Data Seluruh UKS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Penjangkaran dengan Aplikasi dapodik/emis
Angka Rata-rata Lama Sekolah	
Kode Data	-
Nama Data	Angka rata-rata lama sekolah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolah merupakan gambaran umum kelas/tahun pendidikan yang dicapai suatu wilayah
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia } \geq 25 \text{ yang sesuai kelas pendidikan}}{\text{Jumlah Penduduk Usia } \geq 25}$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Usia ≥ 25 tahun yang sesuai kelas pendidikan • Penduduk Usia ≥ 25 tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Pendidikan yang Ditamatkan	
Kode Data	-
Nama Data	Angka pendidikan yang ditamatkan
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Merupakan perbandingan jumlah penduduk yang mencapai pendidikan tertentu (SD/MI/Paket A atau

	SMP/MTs/Paket B) dengan total jumlah penduduk.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendidikan tertentu • Total Jumlah Penduduk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka partisipasi sekolah (APS)
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan gambaran umum keikutsertaan pendudukan usia 7-18 tahun pada pendidikan
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$APS = \frac{\text{Jumlah Siswa Usia 7-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-18 tahun}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Siswa Usia 7-18 tahun dan data Penduduk Usia 7-18 tahun. Dengan ketentuan SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/SMK/MA/Paket C
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Partisipasi Kasar (APK)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka partisipasi kasar
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka partisipasi kasar merupakan jumlah peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan sebagai prosentase dari populasi sekolah terkait.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$APK = \frac{\text{Jumlah siswa di sekolah sesuai jenjang}}{\text{Jumlah usia sekolah}}$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah siswa sekolah sesuai jenjang • Jumlah siswa sekolah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	
Kode Data	-
Nama Data	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki merupakan gambaran umum kemampuan baca tulis penduduk usia 15-24 tahun di suatu wilayah
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Penduduk usia 15 - 24 tahun keatas yang melek huruf}}{\text{Banyak usia penduduk 15 - 24 tahun}} \times 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Usia 15-24 tahun yang melek huruf • Banyak usia penduduk 15-24 tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Melek Huruf (AMH)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka melek huruf
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Penduduk usia 15 tahun keatas yang melek huruf}}{\text{Banyak usia penduduk 15 tahun keatas}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Usia 15 tahun keatas yang melek huruf • Banyak usia penduduk 15 tahun keatas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Putus Sekolah (APS)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Putus Sekolah
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum

	tamat SD yang dinyatakan dalam persen.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah murid putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah murid putus sekolah ditingkat pendidikan tertentu • Jumlah siswa ditingkat pendidikan tertentu
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Angka Partisipasi Murni (APM)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Partisipasi Murni
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pada usia tertentu}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu • Jumlah penduduk pada usia tertentu
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Melanjutkan (AM)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Melanjutkan (AM)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan / Kementerian Agama

Konsep/Definisi	Angka Melanjutkan (AM) menunjukkan persentase lulusan jenjang pendidikan sebelumnya yang melanjutkan ke jenjang berikutnya
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah siswa baru dijenjang selanjutnya}}{\text{Jumlah siswa lulus dijenjang sebelumnya}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah siswa baru dijenjang selanjutnya • Jumlah siswa lulus dijenjang sebelumnya
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Angka Kelulusan (AL)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Kelulusan (AL)
Unit Kerja Penghasilan	Kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi
Konsep/Definisi	Angka Melanjutkan (AM) gambaran umum tingkat kelulusan jenjang SMP sederajat/SMP/SMA sederajat yang memasuki jenjang sma sederajat.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Peserta lulus}}{\text{Jumlah peserta ujian akhir sekolah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data Peserta Lulus • Data Peserta Ujian Akhir Sekolah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	
Kode Data	-

Nama Data	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^n \text{Lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas}$ N : Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Lama sekolah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas • Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Harapan Lama Sekolah (HLS)	
Kode Data	-
Nama Data	Harapan Lama Sekolah
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia tertentu bersekolah pada tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk usia tertentu bersekolah pada tahun tertentu • Jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Sampling
Jumlah warga negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah warga negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan Provinsi
Konsep/Definisi	Jumlah warga negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah merupakan analisis gambaran umum Penduduk Usia 16-18 tahun yang di layani SMA Sederajat.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah peserta didik usia 16-18 yang terdaftar dalam pendidikan menengah
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah anak usia 16-18 tahun yang terlayani
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Jumlah sekolah taman kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan gambaran umum data TK dibawah kemendikbud
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Murid TK yang bernaung di Dinas Pendidikan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah anak yang terdaftar di TK
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang/anak

Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Taman Kanak-Kanak (TK) adalah jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid taman kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan gambaran umum data guru TK dibawah kemendikbud
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid TK yang bernaung di Dinas Pendidikan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid TK yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di

	Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Saat ini murid kelas 6 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan Sekolah Dasar dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/SLTP. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan gambaran umum data guru SD dibawah kemendikbud
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) yang bernaung di Dinas Pendidikan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian

	Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan gambaran umum data guru SMP dibawah kemendikbud
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bernaung di Dinas Pendidikan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan merupakan gambaran umum data guru SMA dibawah kemendikbud
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bernaung di Dinas Pendidikan

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sekolah, Guru, dan Murid SMA
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Unit Kerja Penghasilan	Kemdikbudristek
Konsep/Definisi	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi merupakan gambaran umum data PTN dan PTS di bawah Kemendikbud.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah PTN dan PTS yang bernaung di Kemdikbud
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah PTN dan PTS yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Data dapat di unduh di referensi data kemdikbud
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Kode Data	-

Nama Data	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan gambaran umum peserta didik yang terlayani di PAUD
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Peserta didik usia 3 – 6 tahun yang terdaftar di PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 – 6 tahun}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data Penduduk Usia 3-6 • Data Penduduk Usia 3-6 yang terdaftar di PAUD
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
Unit Kerja Penghasilan	BPS
Konsep/Definisi	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) merupakan rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Peserta didik Usia 18–21 terdaftar di PT}}{\text{Jumlah penduduk usia 18–21 tahun}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data Penduduk Usia 18-21 • Data Penduduk Usia 18-21 yang terdaftar di PT
Ukuran	Persentase

Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Proporsi Sekolah	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Proporsi sekolah merupakan gambaran umum kondisi sarana-prasarana penunjang pendidikan
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Persentase sarana penunjang pendidikan yang memadai
Variabel Pembentuk Indikator	Data sarana prasarana penunjang
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Sertifikasi guru atau sertifikasi pendidik adalah sebuah bukti formal yang membuktikan kalau seseorang telah diakui sebagai profesi guru. Sertifikasi pendidik biasanya tidak langsung diberikan, melainkan melalui proses berbagai uji kompetensi dan

	berbagai tahapan sebelumnya. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik merupakan gambaran umum kompetensi tenaga pendidik di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Guru Bersertifikat Pendidik}}{\text{Guru TK,SD,SMP,SK,PLB}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Data Guru Berserdik • Data Guru TK, SD, SMP, SK, PLB
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Penjaringan dengan Aplikasi dapodik/emis
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung guru jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan disuatu wilayah menurut pendidikan terakhir yang telah ditempuh
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah guru PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan pendidikan terakhir
Variabel Pembentuk Indikator	Guru PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan pendidikan terakhir
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Jenis Kelamin
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung guru jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan disuatu wilayah menurut jenis kelamin yang dimiliki.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah guru PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin
Variabel Pembentuk Indikator	Guru PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan jenis kelamin
Ukuran	Jumlah
Satuan	Guru
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status Kesiswaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung siswa jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan disuatu wilayah menurut status kesiswaan yang dimiliki.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah siswa PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan status kesiswaan
Variabel Pembentuk Indikator	Siswa PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan status kesiswaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Siswa PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Agama
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung siswa jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan disuatu wilayah menurut agama yang diyakini
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah siswa PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan agama
Variabel Pembentuk Indikator	Siswa PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan agama
Ukuran	Jumlah
Satuan	Siswa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung banyaknya lembaga pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan di suatu wilayah berdasarkan kecamatan
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah lembaga PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Lembaga PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lembaga
Referensi Waktu	Semester

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pendidikan
Konsep/Definisi	Menghitung banyaknya lembaga pendidikan jenjang PAUD/SD/SMP/ Kesetaraan berdasarkan status yang dimiliki sekolah (Negeri/Swasta) di suatu wilayah berdasarkan kecamatan
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah lembaga PPAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan status (negeri/swasta)
Variabel Pembentuk Indikator	Lembaga PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan berdasarkan status (negeri/swasta)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Lembaga
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.2 DINAS KESEHATAN

Angka Kejadian TBC	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Kejadian TBC
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik
Konsep/Definisi	Penyakit TBC merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TBC menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk (kadang-kadang ada bercak darah), penurunan berat badan,

	berkeringat di malam hari, dan demam. Pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang-orang tanpa gejala. Pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang melibatkan beberapa antibiotic. Angka kejadian TBC merupakan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis (TBC) baru dan kambuhan yang timbul pada tahun tertentu, dinyatakan sebagai angka per 100.000 penduduk.
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kasus TBC baru \& kambuh}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Semua bentuk TB, termasuk kasus pada orang yang hidup dengan HIV.
Ukuran	Jumlah/Angka
Satuan	Kasus per 100.000 penduduk per tahun
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Angka Kematian TBC	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Kematian TBC
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik
Konsep/Definisi	Penyakit TBC merupakan suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab TBC menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk (kadang-kadang ada bercak darah), penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Pengobatan tidak selalu diperlukan untuk orang-orang tanpa gejala. Pasien dengan gejala aktif akan membutuhkan perjalanan pengobatan panjang yang

	melibatkan beberapa antibiotic. Angka kematian TBC merupakan Angka kematian dikarenakan TBC per 100.000 orang.
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kematian TBC}}{\text{Jumlah seluruh kasus TBC}} \times 100.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kematian dikarenakan TBC per 100.000 penduduk
Ukuran	Jumlah/Angka
Satuan	Kematian per 100.000 penduduk
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Angka Kematian Malaria	
Kode Data	-
Nama Data	Angka kematian malaria
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik
Konsep/Definisi	Penyakit Malaria adalah Penyakit yang disebabkan oleh parasit plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Tingkat keparahan malaria bervariasi berdasarkan spesies plasmodium. Gejala berupa menggigil, demam, dan berkeringat, biasanya terjadi beberapa minggu setelah digigit. Orang yang bepergian ke daerah rawan malaria biasanya mengonsumsi obat pelindung sebelum, selama, dan setelah perjalanan. Penanganan termasuk mengonsumsi obat antimalaria.
Level Estimasi	Pusat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kematian Malaria}}{\text{Jumlah seluruh kasus Malaria}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Input/Variabel Pembentukan Indikator
Ukuran	Jumlah/Angka
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Data Profil SDMK tingkat Kabupaten	
Kode Data	-
Nama Data	Data Profil SDMK tingkat Kabupaten
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas, Rumah Sakit, UPT
Konsep/Definisi	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu upaya strategis untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia. Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah adanya gambaran keadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ditingkat Kabupaten.
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	Rasio
Variabel Pembentuk Indikator	Input/Variabel Pembentukan Indikator
Ukuran	Rasio
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Data Fasilitas Kesehatan	
Kode Data	-
Nama Data	Data Fasilitas Kesehatan
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas, Rumah Sakit, UPT, Klinik, BPJS, dan Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan (sering diakronimkan sebagai faskes) adalah setiap lokasi yang menyediakan pelayanan kesehatan, mulai dari klinik kecil hingga rumah sakit yang besar dengan fasilitas yang lengkap. Jumlah dan kualitas faskes di suatu daerah atau negara merupakan salah satu parameter yang umum dipakai untuk menilai kemakmuran dan kualitas hidup daerah tersebut. Di banyak negara, faskes diatur sampai batas tertentu oleh hukum dan diperlukan perizinan dari

	<p>badan pengatur sebelum fasilitas tersebut dapat dibuka. Faskes dapat dimiliki dan dioperasikan oleh organisasi bisnis, organisasi nirlaba, pemerintah, dan dalam beberapa kasus, oleh individu. Faskes sering kali dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan atau jenjang, yaitu faskes primer, sekunder, tersier, dan kuarterner, berdasarkan tingkat kompleksitas gangguan kesehatan dan kemampuan serta spesialisasi penyedia faskes.</p>
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bekerjasama di bagi Jumlah Faskes di Kali 100 Persen - Jumlah Pustu di Kabupaten Pacitan - Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Pacitan - Jumlah Rumah Sakit Khusus di Kabupaten Pacitan - Jumlah Rumah Sakit Bersalin di Kabupaten Pacitan - Jumlah Puskesmas di Kabupaten Pacitan - Jumlah Klinik di Kabupaten Pacitan
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Puskesmas, klinik dan Pustu - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan - Jumlah Puskesmas di Kabupaten - Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten - Jumlah Data Rumah Sakit Umum - Jumlah Data Rumah Sakit Khusus - Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin - Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan - Jumlah Klinik/Balai Kesehatan

Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Sistem Informasi Tuberkulosis	
Kode Data	-
Nama Data	Sistem Informasi Tuberkulosis
Unit Kerja Penghasilan	Rumah Sakit
Konsep/Definisi	Sistem Informasi TB (SITB) adalah aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan mulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Dokter Praktek Mandiri, Klinik, Laboratorium, Instalasi Farmasi,dll), Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi dan Kementerian Kesehatan, untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TB Sensitif, TB Resistan Obat, laboratorium dan logistik dalam satu platform yang terintegrasi.
Level Estimasi	Pusat
Rumus Perhitungan	$SITB = \frac{\text{Jumlah positif TBC}}{\text{Jumlah seluruh suspec}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Data balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	
Kode Data	-
Nama Data	Data balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Program kelambu berinsektisida merupakan salah satu alternatif untuk pengendalian vektor malaria pada daerah dengan perilaku nyamuk menggigit di dalam rumah maupun daerah Page 3 3

	dengan penolakan Indoor Residual Spraying (IRS).
Level Estimasi	Pusat
Rumus Perhitungan	-
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Sigizi terpadu	
Kode Data	-
Nama Data	Sigizi terpadu
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Sigizi Terpadu merupakan suatu sistem terintegrasi untuk mengetahui status gizi dan kinerja program, yang dapat digunakan untuk identifikasi masalah, kebutuhan dan sebagai bahan pengambilan keputusan serta kebijakan program gizi masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Balita dg zscore antara -3 sd sampai dengan -2sd - Jumlah Balita yang zscorenya kurang dari 3 sd - Jumlah Balita Baduta usia 6-24 bulan yang mendapatkan MPASI - Jumlah TFR per Wus usia 15-49 di Kabupaten Pacitan - Jumlah balita dg zscore kurang dari -2sd menurut indek TB/U - Jumlah baduta dg zscore kurang dari -2sd menurut indek TB/U
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kasus di Posyandu
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Pengelola Program Imunisasi	
Kode Data	-
Nama Data	Pengelola Program Imunisasi

Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Imunisasi anak adalah pemberian vaksin pada anak untuk melindungi mereka dari penularan penyakit tertentu. Vaksin terbuat dari kuman yang sudah melalui proses pelemahan atau bahkan dimatikan. Vaksinasi anak akan menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga merangsang terbentuknya zat antibody
Level Estimasi	Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	Jumlah angka anak yang sudah imunisasi dasar lengkap oleh nakes desa
Variabel Pembentuk Indikator	- Anak kurang <1 tahun - Bayi dan baduta
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Sistem Informasi Hepatitis Dan Infeksi Saluran Pencernaan	
Kode Data	-
Nama Data	Sistem Informasi Hepatitis Dan Infeksi Saluran Pencernaan
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	SIHEP merupakan suatu sistem informasi hepatitis dan infeksi saluran pencernaan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Level Estimasi	Puskesmas
Rumus Perhitungan	Jumlah angka anak yang sudah imunisasi dasar lengkap oleh nakes desa
Variabel Pembentuk Indikator	Balita dan semua umur
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Pengelola Program Kesga (Ksehatan Keluarga) Dan Gizi Jatim	
Kode Data	-
Nama Data	Pengelola program kesga dan gizi jatim
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas

Konsep/Definisi	Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten, Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pesalinan yang di tangani oleh tenaga medis - Jumlah Ibu Nifas yang di layani Nakes - Jumlah Anak Usia di Bawah Lima Tahun yang terlayani di Kabupaten Pacitan - Jumlah Neonatus dengan Komplikasi terlayani di Kabupaten Pacitan - Jumlah Kunjungan Bayi di Kabupaten Pacitan - Jumlah Kunjungan Ibu Hamil di Kabupaten Pacitan - Jumlah Kunjungan Komplikasi di Kabupaten Pacitan - Jumlah Balita pneumonia tertangani di Kabupaten Pacitan - Jumlah balita dengan zscore kurang dari -2sd menurut indek tb/u
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Ibu bersalin terlayani - Ibu nifas terlayani - Balita terlayani - Ibu hamil terlayani - Jumlah stunting - Jumlah ibu hamil yg mengalami anemia
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tiga bulan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Jumlah Malaria Positif	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah malaria positif
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Jumlah penyakit malaria yang ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles
Level Estimasi	Provinsi, Pusat
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kasus}}{\text{Jumlah penderita positif}} \times 1000$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penderita malaria positif
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Jumlah Filariasis Positif	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Filariasis Positif
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Filariasis adalah sejumlah infeksi yang disebabkan oleh cacing filaria dan dapat menyerang hewan maupun manusia. Ada banyak jenis parasit filaria memiliki ratusan jenis, tapi hanya delapan spesies yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia.
Level Estimasi	Provinsi
Rumus Perhitungan	Jumlah penderita
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penderita
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Jumlah Obesitas	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah obesitas
Unit Kerja Penghasilan	Puskesmas
Konsep/Definisi	Penyakit obesitas merupakan suatu gangguan yang melibatkan lemak tubuh berlebihan yang meningkatkan risiko masalah kesehatan. Obesitas sering kali

	terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Obesitas terjadi ketika indeks massa tubuh seseorang adalah 30 atau lebih besar. Gejala utama adalah lemak tubuh yang berlebihan, yang meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Penanganan utamanya adalah perubahan gaya hidup seperti pola makan dan olahraga.
Level Estimasi	Provinsi
Rumus Perhitungan	Jumlah penderita
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penderita obesitas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Desa/Kelurahan yang Sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Desa/kelurahan yang 100% masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah total desa/kelurahan yang sudah Stop BABS menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	desa/kelurahan yang sudah Stop BABS menurut kecamatan
Ukuran	Angka
Satuan	Desa/Kelurahan
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) Menurut Kecamatan	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (PURI) Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Suatu desa/kelurahan dikatakan sebagai desa/kelurahan siaga aktif jika: Penduduknya dapat mengakses pelayanan kesehatan dasar (yankesdas) setiap hari. Penduduknya dapat mengembangkan Upaya Keseharan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah total desa siaga aktif Purnama Mandiri (PURI) menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Cakupan desa Siaga Aktif berstrata PURI
Ukuran	Angka
Satuan	Desa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 Jam menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Kejadian Luar Biasa : Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Ditangani <24 jam : Penanggulangan KLB kurang dari 24 jam sejak laporan W1 diterima sampai penyelidikan dilakukan dengan catatan selain formulir W1 dapat juga berupa faximili

	atau telepon. KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam : Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah Kejadian Luar Biasa (klb) di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang Ditangani < 24 Jam Menurut Kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Desa/Kelurahan
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kematian Ibu menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah kematian ibu menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Kematian ibu menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah

Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan menurut Kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan menurut Kecamatan
Ukuran	Angka
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan

Konsep/Definisi	Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi a. Pemeriksaan status mental b. Wawancara 2. Edukasi kepatuhan minum obat 3. Melakukan rujukan jika diperlukan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Penyakit Menular Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Penyakit Menular menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah penyakit menular menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penyakit menular menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Penyakit tidak menular adalah sebuah penyakit yang tidak mengalami proses pemindahan dari orang lain, namun menjadi penyebab kematian paling banyak bagi masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah penyakit tidak menular menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penyakit tidak menular menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I adalah polio, hepatitis B, pertusis, difteri, haemophilus influenzae tipe B, campak dan tetanus. Melalui imunisasi PD3I dapat dicegah sehingga mencetak generasi Indonesia unggul.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Puskesmas berdasarkan pelayanan rawat inap dan non rawat inap menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan: a. Rumah Sakit umum; dan

	<p>b. Rumah Sakit khusus.</p> <p>□ Rumah Sakit umum : memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan medik dan penunjang medik; 2. Pelayanan keperawatan dan kebidanan; 3. Pelayanan nonmedik. <p>□ Rumah Sakit khusus : memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya</p>
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Rumah sakit berdasarkan jenis rumah sakit menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	<p>Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan kelasnya, Rumah Sakit dikategorikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Kelas A • Rumah Sakit Kelas B

	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Kelas C • Rumah Sakit Kelas D
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Berisiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Berisiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	Screening faktor resiko penyakit tidak menular adalah salah satu upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif dalam mengendalikan penyakit tidak menular.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah screening penyakit tidak menular (ptm) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Screening penyakit tidak menular (ptm) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi menurut kecamatan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Kecamatan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kesehatan
Konsep/Definisi	<p>Penilaian status gizi anak dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan Standar Antropometri Anak yang menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; b. Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; c. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; d. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan e. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. <p>Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan, digunakan untuk menentukan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berat badan sangat kurang (severely underweight); b. Berat badan kurang (underweight); c. Berat badan normal; dan d. Risiko berat badan lebih.

	<p>Indeks Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan, digunakan untuk menentukan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sangat pendek (severely stunted); Pendek (stunted); Normal; dan Tinggi. <p>Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 (nol) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan, digunakan untuk menentukan kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gizi buruk (severely wasted); Gizi kurang (wasted); Gizi baik (normal); Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight); Gizi lebih (overweight); dan Obesitas (obese).
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Total jumlah status gizi balita berdasarkan indeks menurut kecamatan
Variabel Pembentuk Indikator	Status gizi balita berdasarkan indeks menurut kecamatan
Ukuran	Angka
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Semester
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR)

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	
Kode Data	-
Nama Data	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Bina Marga

Konsep/Definisi	Infrastruktur jalan dapat diartikan sebagai capital stock dalam bentuk fisik yang merupakan faktor input dalam fungsi produksi, sehingga kenaikan dari infrastruktur jalan akan menaikkan output. Proyek strategis yang ada dalam daftar action plan Kementerian PUPR masih sekitar jalan raya (termasuk jalan tol), waduk, jembatan, perumahan rakyat. Pola membangun pinggiran Indonesia masih terus menjadi prioritas.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{Panjang total jalan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Penampung Air dan Imgrasi	
Kode Data	-
Nama Data	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Bangunan Penampung Air dan Imgrasi
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Sumber Daya Air
Konsep/Definisi	Infrastruktur bangunan penampung air dan imgrasi merupakan infrastruktur strategis karena di dalamnya ada sederet manfaat mulai dari pengendalian banjir, mengatasi kekeringan secara berkesinambungan, budi daya perikanan sebagai sumber protein, penyediaan air baku untuk air bersih, air irigasi untuk persawahan rakyat, dan pembangkit listrik tenaga, sumber energy yang terbarukan, juga pariwisata
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	

	$\frac{\text{Jumlah bangunan penampung air di daerah kekeringan}}{\text{Jumlah total bangunan penampung air}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tersedianya bangunan penampung air di daerah kekeringan - Persentase luasan daerah irigasi dalam kondisi baik
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan air minum	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan air minum
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
Konsep/Definisi	Infrastruktur pelayanan air minum membangun irigasi untuk jutaan hektare lahan dengan sumbangan 85% tanaman padi nasional, rehabilitasi ribuan kilometer sungai dan pantai, layanan air minum dan layanan sanitasi, sertamemfasilitasi pembangunan jutaan rumah untuk masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga mendapat akses air}}{\text{Jumlah total rumah tangga}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/ Kota.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan persampahan regional	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan persampahan regional
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
Konsep/Definisi	Infrastruktur pengelolaan persampahan regional merupakan persentase bangunan sistem pengelolaan persampahan regional.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan banunan sistem pengelolaan sampah (TPA)}}{\text{Jumlah pemenuhan banunan sistem pengelolaan sampah (TPA)}} \times 100$
Variabel Pembentuk Indikator	Persentase bangunan sistem pengelolaan persampahan regional
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan air limbah domestik
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
Konsep/Definisi	Infrastruktur yang mengukur jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses}}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan sistem drainase	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengelolaan sistem drainase
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Penyehatan Lingkungan dan Air Minum
Konsep/Definisi	Drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknik sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi. Untuk perumahan sendiri pengertian drainase menjadi lebih spesifik lagi. Drainase dalam perumahan adalah sebuah sistem yang mengatur jalur keluar masuknya air, baik air bersih maupun kotor agar berada pada jalur yang telah ditentukan.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur

	pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/ Kota
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur gedung	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur gedung
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
Konsep/Definisi	Infrastruktur gedung/bangunan adalah teknik dan praktek konstruksi dari persiapan lahan dimana satu bangunan atau lebih sedang dalam proses pembangunan atau renovasi.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan } \frac{IMB}{PBG} \text{ yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB/PBG yang berlaku}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Rasio kepatuhan IMB/PBG Kab/ Kota dan Persentase gedung Pemerintah Kabupaten yang dibangun dan dipelihara sesuai standart bangunan gedung Negara
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
Konsep/Definisi	Infrastruktur penataan bangunan dan lingkungan merupakan untuk

	mengetahui Jumlah penataan kawasan yang dibangun
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah penataan kawasan yang dibangun
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penataan kawasan yang dibangun
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya pelayanan jasa konstruksi
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi
Konsep/Definisi	Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	
Kode Data	-
Nama Data	Meningkatnya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tata Ruang
Konsep/Definisi	Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Dapat

	diketahui melalui Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas pemanfaatan ruang}}{\text{Luas rencana pola ruang dalam RT RW}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Persentase ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan

3.4 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (PERKIMTAN)

Rasio Rumah Layak Huni	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Rumah Layak Huni
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU PKP). Rasio rumah layak huni merupakan perbandingan dari jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh penduduk. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah layak huni diantaranya kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas); kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio rumah layak huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah rumah layak huni - Jumlah penduduk
Ukuran	Rasio
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Rasio Permukiman Layak Huni	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Permukiman Layak Huni
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Pemukiman layak huni adalah lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan penataan sesuai dengan standar dan tata ruang yang berlaku serta menjamin kesehatan masyarakat. Rasio permukiman layak huni merupakan perbandingan luas permukiman layak huni dengan jumlah seluruh kawasan permukiman.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	$Rasio = \frac{\text{Jumlah permukiman layak huni}}{\text{Jumlah seluruh kawasan permukiman}}$
Variabel Pembentuk Indikator	- Luas Permukiman layak huni - Luas kawasan permukiman
Ukuran	Rasio
Satuan	-
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Rumah tangga kumuh merupakan sekelompok individu yang hidup di bawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang

	kurang memenuhi satu atau lima kondisi antara lain: ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi yang memadai, dan kepemilikan yang aman. Proporsi rumah tangga umuh perkotaan adalah perbandingan antara proporsi jumlah rumah tangga kumuh perkotaan dengan jumlah seluruh rumah.
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}}$
Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan; - Jumlah Seluruh Rumah;
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Persentase Pemukiman Yang Tertata	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Pemukiman Yang Tertata
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Pemukiman yang tertata adalah area bangunan rumah yang tertata secara teratur menghadap jalan memadai, dan kepemilikan yang aman. Persentase pemukiman yang tertata yaitu perbandingan antara luas kawasan permukiman layak huni dengan luas seluruh kawasan permukiman.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Layak Huni}}{\text{Luas Seluruh Kawasan Permukiman}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Luas Kawasan Permukiman Layak Huni; - Luas Seluruh Kawasan Permukiman.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Pemukiman kumuh di kawasan perkotaan merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dengan luas seluruh kawasan permukiman.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan}}{\text{Luas seluruh kawasan permukiman}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Luas Kawasan Permukiman kumuh di kawasan perkotaan; - Luas Seluruh Kawasan Permukiman.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase lingkungan pemukiman kumuh
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Lingkungan pemukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain

	memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Persentase lingkungan pemukiman kumuh yaitu perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh kabupaten dengan luas seluruh kawasan permukiman.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh kabupaten}}{\text{Luas seluruh kawasan permukiman}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Luas Kawasan Permukiman kumuh kabupaten; - Luas Seluruh Kawasan Permukiman.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Persentase Areal Kawasan Kumuh	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase areal kawasan kumuh
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Areal kawasan kumuh secara umum, daerah kumuh diartikan sebagai suatu kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal dengan bangunan-bangunan berkondisi substandar atau tidak layak dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi. Persentase areal kawasan kumuh yaitu luas seluruh kawasan kumuh dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani pada tahun N.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase areal kawasan kumuh} = \text{Luas kawasan kumuh} - \text{Luas kawasan kumuh ditangani tahun ke N}$

Variabel Pembentuk Indikator	- Luas Seluruh Kawasan Kumuhi; - Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani Pada Tahun N
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar (Ha)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	
Kode Data	-
Nama Data	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni dan terjangkau didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak dan terjangkau pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu}}$
Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah Rumah Tangga MBR Yang Menempati Rumah Layak Huni Dan Terjangkau Pada Kurun Waktu Tertentu; - Jumlah Rumah Tangga MBR Pada Kurun Waktu Tertentu.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	
Kode Data	-

Nama Data	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu perbandingan antara jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Rumah layak huni di suatu wilayah}}{\Sigma \text{ Rumah di suatu wilayah pada waktu } N}$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Seluruh Rumah Layak Huni Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu; - Jumlah Jumlah Rumah Di Suatu Wilayah Kerja Pada Kurun Waktu Tertentu.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perumahan
Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\Sigma \text{ Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}$
Variabel Pembentuk Indikator	Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Bantuan Rumah Layak Huni

Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perumahan
Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Σ Jumlah luasan pemukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar (Ha)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman
Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Permukiman
Konsep/Definisi	Kawasan di Permukiman Kumuh Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Penjumlahan Kawasan di Permukiman Kumuh Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
Ukuran	Luas
Satuan	Hektar (Ha)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kawasan Perumahan
Konsep/Definisi	Memantau peningkatan rumah tangga yang tinggal di hunian layak dan terjangkau, dalam mendukung pengurangan penduduk yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak.
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$PHLT = \frac{JRTHLT}{JRT} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PHLT: Persentase rumah tangga hunian layak dan terjangkau - JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau - JRT: Jumlah rumah tangga
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - JRTHLT: Jumlah rumah tangga hunian layak dan terjangkau - JRT: Jumlah rumah tangga
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perumahan
Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Rumah tangga kumuh perkotaan merupakan sekelompok individu yang hidup di bawah atap yang sama pada daerah perkotaan yang kurang memenuhi satu atau lima kondisi antara lain: ketahanan rumah, kecukupan tempat tinggal, akses air bersih, akses sanitasi

	yang memadai, dan kepemilikan yang aman. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan yaitu perbandingan antara proporsi jumlah rumah tangga kumuh perkotaan dengan jumlah seluruh rumah
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Rumah tangga kumuh perkotaan}}{\Sigma \text{ Seluruh rumah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan; - Jumlah Seluruh Rumah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perumahan
Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perumahan
Konsep/Definisi	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Level Estimasi	Desa/Kelurahan
Rumus Perhitungan	Penjumlahan Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Variabel Pembentuk Indikator	Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
Ukuran	Jumlah
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Laporan Hasil Kegiatan Bidang Perumahan
-------------------------	-----------------------------------------

3.5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

Angka Kriminalitas	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Kriminalitas
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di manapun berada. Kriminalitas tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam negara serta norma-norma sosial hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah seluruh kasus kriminalitas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kriminalitas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Angka Kriminalitas Tertangani	
Kode Data	-
Nama Data	Angka Kriminalitas Tertangani
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kriminalitas adalah tindak kejahatan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas adalah masalah umum yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di manapun berada. Kriminalitas tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang

	berlaku dalam negara serta norma-norma sosial hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kasus kriminalitas tertangani}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kriminalitas tertangani
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	
Kode Data	-
Nama Data	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Cakupan petugas perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah petugas Satlinmas}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah petugas perlindungan masyarakat
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Kasus Demonstrasi	
Kode Data	-
Nama Data	Kasus Demonstrasi
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kasus demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Dalam undang-undang ini, demonstrasi

	adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus demonstrasi
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus demonstrasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Kasus Demonstrasi Bidang Ekonomi	
Kode Data	-
Nama Data	Kasus Demonstrasi Bidang Ekonomi
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kasus demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus demonstrasi ekonomi
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus demonstrasi ekonomi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan

Kasus Demonstrasi Bidang Politik	
Kode Data	-
Nama Data	Kasus Demonstrasi Bidang Politik
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kasus demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Dalam undang-undang ini, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus demonstrasi politik
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus demonstrasi politik
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Persentase Penegakan PERDA	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Penegakan PERDA
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perda atau Perkada yang memuat sanksi}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada}} \times 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Tingkat Peyelesaian Pelanggaran K3	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat Peyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselseikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pelanggaran K3
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Unit Kerja Penghasilan	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Konsep/Definisi	Kumpulan pendataan pada tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah waktu tanggap}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kejadian
Ukuran	Rasio
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
-------------------------	-----------------

3.6 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Indeks Resiko Bencana	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Resiko Bencana
Unit Kerja Penghasilan	BPBD
Konsep/Definisi	Ukuran yang menunjukkan hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya terhadap vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan dan komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Hazard</i> (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. • <i>Vulnerability</i> (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. • <i>Capacity</i> (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan

	efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Indeks Ketahanan Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Ketahanan Daerah
Unit Kerja Penghasilan	BPBD
Konsep/Definisi	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$IKD = (Kapabilitas/100) \times 100$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola: Variabel ini mengukur kualitas tata kelola dalam penanggulangan bencana, seperti keberadaan kebijakan, peraturan, kelembagaan, rencana, anggaran, dan mekanisme koordinasi. • Sosial: Variabel ini mengukur aspek sosial yang mempengaruhi ketahanan masyarakat, seperti tingkat pendidikan, kesehatan, kesadaran, partisipasi, dan solidaritas. • Ekonomi: Variabel ini mengukur faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kapasitas wilayah, seperti tingkat pendapatan, kemiskinan, lapangan kerja, dan diversifikasi. • Fisik: Variabel ini mengukur kondisi fisik yang menentukan kerentanan dan keterpaparan

	wilayah, seperti kualitas infrastruktur, fasilitas, perumahan, dan lingkungan.
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.7 DINAS SOSIAL

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	Jaminan sosial atau jamsos adalah salah satu bentuk perlindungan dari Pemerintah kepada rakyatnya. Tujuannya agar seluruh kebutuhan dasar hidup rakyatnya dalam hal kesehatan dan perlindungan kesejahteraan tercapai, dalam hal ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penerima}}{\text{jumlah yang seharusnya mendapatkan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Penyandang cacat dan lanjut usia
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, minta data ke bidang yang menangani.
Persentase PPKS yang tertangani	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tertangani
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial

Konsep/Definisi	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS terdiri dari : Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas, Korban bencana, dan lainnya.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penerima}}{\text{jumlah yang seharusnya mendapatkan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani.
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa

	kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penerima}}{\text{jumlah yang seharusnya mendapatkan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan bantuan sosial
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan upaya untuk memastikan apakah kelompok tersebut mendapatkan pendampingan hukum.
Level Estimasi	Perorangan
Rumus Perhitungan	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan
Ukuran	Orang
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani
Jumlah Penerima Bantuan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah penerima bantuan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial

Konsep/Definisi	Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Level Estimasi	Perorangan
Rumus Perhitungan	Jumlah penerima bantuan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penerima bantuan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani
Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	Jumlah anggaran untuk bantuan sosial pangan
Level Estimasi	Perorangan
Rumus Perhitungan	Jumlah anggaran bantuan sosial pangan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah anggaran bantuan sosial pangan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan data sekunder, meminta data dari bidang yang menangani
Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Korban Bencana Alam Menurut Jenis Bencana
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

	kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Level Estimasi	Kabupaten/kota
Rumus Perhitungan	Jumlah total korban bencana alam menurut jenis bencana
Variabel Pembentuk Indikator	Jenis bencana
Ukuran	Angka
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Triwulan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Sosial
Konsep/Definisi	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah total pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan PMKS
Variabel Pembentuk Indikator	Jenis PMKS
Ukuran	Angka
Satuan	Jiwa
Referensi Waktu	Triwulan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.8 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK (PPKB PPPA)

Ratio Akseptor KB	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Akseptor KB
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah cakupan PA dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Akseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Akseptor KB}}{\text{PUS (Pasangan Usia Subur)}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Akseptor KB dan Pasangan Usia Subur
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	
Kode Data	-
Nama Data	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah anak yang dilahirkan per keluarga
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah anak usia 0-21 tahun dibagi Jumlah Keluarga
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah anak usia 0-21 tahun dan jumlah keluarga
Ukuran	Rata-rata
Satuan	Anak
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan

Rasio KDRT	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio KDRT
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$Ratio = \frac{\Sigma KDRT}{\Sigma Rumah\ tangga} \times 100$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah KDRT dan jumlah rumah tangga
Ukuran	Rasio
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 1 bulan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$Persentase = \frac{Jumlah\ PB\ MKJP}{PPM\ PB\ MKJP} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah PB MKJP dan PPM PB MKJP
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan

Persentase Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pengaduan oleh petugas terlatih
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Kasus yang masuk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pengaduan tindak kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan dan jumlah kasus masuk yang ditangani oleh pelayanan terpadu
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata

	laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan yang mendapat layanan}}{\Sigma \text{ Korban Kekerasan yang masuk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pengaduan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dan Korban kekerasan yang masuk.
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Perempuan anak korban kekerasan yang mendapat layanan reintegrasi sosial}}{\Sigma \text{ Jumlah Korban Kekerasan yang masuk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan Korban Kekerasan yang Masuk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi

Persentase cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{Perempuan anak korban kekerasan yang mendapat layanan pemulangan}}{\Sigma \text{Jumlah korban Kekerasan yang masuk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dan Korban Kekerasan yang masuk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga yaitu unsur agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan lingkungan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{Kelompok kegiatan yang mendapat materi pembinaan 8 fungsi keluarga}}{\Sigma \text{Kelompok kegiatan}} \times 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kelompok kegiatan yang mendapat materi • Jumlah kelompok kegiatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (Laporan Bulanan)
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	
Kode Data	-
Nama Data	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah TIAL dan IAT}}{\text{PUS}} \times 100$ <p>Keterangan : TIAL = Tidak ingin anak lagi IAT = Ingin Anak di Tunda PUS = Pasangan Usia Subur</p>
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah TIAL dan IAT dan PUS
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase pemakaian CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase pemakaian CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS

Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah KB aktif modern dan Jumlah PUS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan, merupakan indikator pencapaian kompetensi dasar mengembangkan orang untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki - laki}}$
Variabel Pembentuk Indikator	IPM perempuan dan IPM laki-laki
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)

Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	<p><i>Persentase</i></p> $= \frac{\text{Jumlah TIAL dan IAT}}{\text{PUS}} \times 100\%$ <p>Keterangan : TIAL = Tidak Ingin Anak Lagi IAT = Ingin Anak di Tunda</p>
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah TIAL dan IAT dan PUS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Mengukur peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$IDG = \frac{1}{3} \times (Ipar + IDM + Lin - Dist)$ <p>Keterangan: Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks Pengambilan Keputusan Linc = Indeks distribusi pendapatan</p>
Variabel Pembentuk Indikator	Indeks Keterwakilan di Parlemen Indeks Pengambilan Keputusan Indeks Distribusi Pendapatan
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka

Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{korban korban kekerasan mendapat layanan}}{\Sigma \text{Kasus yang masuk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (Laporan Bulanan)
Persentase prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar pemakaian kontrasepsi di suatu wilayah.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$mCPR = \frac{\Sigma \text{PUS Pengguna Kontrasepsi Modern}}{\text{PUS}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah PUS pengguna kontrasepsi modern dan Jumlah PUS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan

Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB)	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Rumah data kependudukan adalah rumah/tempat yang difungsikan sebagai pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis, data yang bersumber dari, oleh dan masyarakat
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{Rumah data kependudukan paripurna}}{\Sigma \text{Total rumah dan kependudukan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah rumah data kependudukan paripurna dan jumlah total rumah data kependudukan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS
Level Estimasi	Kabupaten

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Peserta KB Aktif Modern}}{\Sigma \text{Jumlah PUS}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah KB aktif dan Jumlah PUS
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu yaitu umur 15-19
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\text{ASFR } 15 - 19 \text{ tahun} = \frac{\text{Bi } 15 - 19 \text{ tahun}}{\text{Pfi } 15 - 19 \text{ tahun}} \times 1000$ <p>Keterangan: Bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada tahun tertentu Pfi = Jumlah penduduk perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama dengan bilangan konstanta biasanya 1000</p>
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kelahiran Perempuan Umur 15-19 dan Jumlah Penduduk Perempuan pada kelompok Umur 15-19 Tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan

Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan seksual.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Perempuan dewasa anak (15-64 th) mengalami kekerasan seksual}}{\text{Jumlah penduduk perempuan \& anak (15-64th)}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15 64 tahun) mengalami kekerasan seksual - Jumlah Penduduk Anak dan Perempuan Usia 15-64 tahun
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPPA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Perempuan korban pelanggaran HAM terutama kekerasan terhadap perempuan
Level Estimasi	Kabupaten

Rumus Perhitungan	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan
Variabel Pembentuk Indikator	Korban kekerasan terhadap perempuan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang/kasus
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Bulanan
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPKB Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
Konsep/Definisi	Keterwakilan Perempuan di DPRD
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah keterwakilan Perempuan di DPRD}}{\text{Jumlah Perempuan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Keterwakilan perempuan di DPRD
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan Tahunan

3.9 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Data Populasi Ternak	
Kode Data	-
Nama Data	Data Populasi Ternak
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Populasi ternak dinyatakan sebagai jumlah ternak yang hidup pada suatu wilayah pada periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam tahun. Lalu data populasi ternak merupakan kumpulan atau jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ras pedaging.

Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Populasi ternak} = \text{populasi awal} + \text{kelahiran} - \text{kematian ternak} - \text{pemotongan} - \text{ternak keluar} + \text{ternak masuk pada periode waktu ke } t$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah ternak yang lahir, jumlah ternak yang mati, jumlah ternak yg dipotong, jumlah ternak masuk, jumlah ternak keluar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Referensi Waktu	Per 4 bulan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Data Populasi Unggas	
Kode Data	-
Nama Data	Data Populasi Unggas
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Populasi unggas dinyatakan sebagai jumlah unggas yang hidup pada suatu wilayah pada periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam tahun. Lalu data populasi unggas merupakan populasi unggas yang hidup dan pernah hidup di dalam usaha budidaya selama setahun.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah populasi unggas selama setahun
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah populasi unggas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Ekor
Referensi Waktu	Per 4 bulan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Data Produksi Daging Ternak	
Kode Data	-
Nama Data	Data Produksi Daging Ternak

Unit Kerja Penghasilan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak di wilayah tersebut ditambah dengan <i>edible offal</i> (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Produksi daging} =$ $\text{Berat karkas (dengan edibel offal)}$ $\times \text{Jumlah pemotongan ternak pada tahun yang bersangkutan}$
Variabel Pembentuk Indikator	Berat bekas dan jumlah pemotongan ternak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kg
Referensi Waktu	Per 4 bulan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Data Produksi Telur Unggas	
Kode Data	-
Nama Data	Data Produksi Telur Unggas
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Jumlah produksi telur unggas (ayam buras, ayam ras petelur, burung puyuh, itik dan entok) selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan pada orang lain.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Produksi telur} = \text{populasi ternak unggas}$ $\times \text{parameter produksi telur unggas}$ $\times \% \text{ betina produktif}$
Variabel Pembentuk Indikator	Populasi ternak unggas, produksi telur unggas, dan betina produktif
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kg
Referensi Waktu	Per 4 bulan

Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Data Produksi Susu Sapi	
Kode Data	-
Nama Data	Data Produksi Telur Unggas
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Jumlah air susu yang keluar dari sapi betina selama satu tahun, termasuk yang diberikan kepada pedet/anak sapi, rusak, diperdagangkan. Dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Produksi susu} = \text{parameter produksi susu} \times \text{populasi sapi perah} \times \% \text{ betina produktif pada tahun } t$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah produksi susu, populasi sapi perah dan betina produktif
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kg
Referensi Waktu	Per 4 bulan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	
Kode Data	-
Nama Data	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi
Unit Kerja Penghasil	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Data informasi tentang Angka Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi yang diperoleh dari pola pangan masyarakat. Yang disurvei selama 2 hari dengan cara mengukur kwantitas pangan atau energi yang dikonsumsi dibandingkan dengan angka kecukupan energi yang ideal.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Skor PPH = Skor AKE (Angka Kecukupan Energi) dibandingkan dengan skor maksimal kali skor maksimal jika hasilnya lebih besar dari

	skor maksimal maka yang digunakan skor maksimal Skor AKE = % AKE kali bobot, % AKE dibagi 2.000 Kkal kali 100
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pengeluaran pangan rumah tangga, tingkat pendapatan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei dengan kuisisioner
Persentase Pangan yang Aman	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase pangan yang aman
Unit Kerja Penghasil	Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Persentase pangan yang bebas yang dari 3 cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik. Persentase pangan yang aman diperoleh dari pengukuran uji sampel bahan pangan yang diperoleh dari pasar, kemudian pangan yang aman dibandingkan dengan jumlah pangan yang diambil.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sampel yang diuji aman}}{\text{Jumlah semua sampel yang diuji}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah sampel yang diuji aman dan jumlah semua sampel yang diuji
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Menguji sampel bahan makanan, pengambilannya secara acak di pasar
Indeks Kepuasan Masyarakat	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Kepuasan Masyarakat
Unit Kerja Penghasil	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas

	pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{jumlah unsur}} \times \text{Nilai Penimbang}$
Variabel Pembentuk Indikator	Total nilai persepsi per unsur Jumlah unsur Nilai penimbang
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei dengan kuisisioner
Produksi Tanaman Pangan	
Kode Data	-
Nama Data	Produksi Tanaman Pangan
Unit Kerja Penghasil	Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Produksi padi dan palawija adalah hasil kali dari luas panen dan produktivitas
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Produksi = luas panen x produktivitas (hasil/ha)
Variabel Pembentuk Indikator	Luas panen dari laporan SP (Statistika Pertanian padi dan palawija) bulanan dari setiap kecamatan. Produktivitas dari hasil ubinan tingkat lapangan
Ukuran	Berat
Satuan	Ton
Referensi Waktu	4 bulan sekali
Metode Pengumpulan Data	Survei dengan kuesioner
Produksi Tanaman Holtikultura	
Kode Data	-
Nama Data	Produksi Tanaman Holtikultura
Unit Kerja Penghasil	Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman holtikultura menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan laporan

Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Produksi = banyaknya hasil dari setiap tanaman hortikultura berdasarkan luas yang dipanen pada bulan/triwulan laporan
Variabel Pembentuk Indikator	Banyaknya hasil dari setiap tanaman hortikultura berdasarkan luas yang dipanen pada bulan
Ukuran	Berat
Satuan	Ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Survei dengan kuisisioner
Produksi Dalam Angka Komoditas Perkebunan	
Kode Data	-
Nama Data	Produksi Dalam Angka Komoditas Perkebunan
Unit Kerja Penghasil	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Perkebunan
Konsep/Definisi	Data informasi tentang jumlah produksi komoditas perkebunan (kelapa, cengkeh, kopi, kakao, jambu mete, kapuk randu, aren, lada, nilam, kapas, tembakau) yang diusahakan oleh petani/pekebun di 12 kecamatan se Kabupaten Pacitan dalam 1 tahun.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah total produksi dari masing-masing komoditas
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah produksi komoditas perkebunan
Ukuran	Berat
Satuan	Kg
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (Input data dari masing-masing mantri perkebunan di 12 kecamatan)
Data Indeks Pertanaman	
Kode Data	-
Nama Data	Data Indeks Petanaman
Unit Kerja Penghasil	Bidang PSPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Rerata masa tanam dan masa panen dalam satu tahun pada lahan yang sama
Level Estimasi	Kabupaten

Rumus Perhitungan	$IP = \frac{\text{Luas tanam padi sawah dalam satu tahun}}{\text{Luas lahan sawah}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Luas tanam padi sawah dalam satu tahun Luas lahan sawah
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Data Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian yang Ditumbuhkan	
Kode Data	-
Nama Data	Data persentase peningkatan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ditumbuhkan
Unit Kerja Penghasil	Bidang SPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Konsep/Definisi	Peningkatan jumlah pelaku utama dan pelaku usaha pertanian yang ditumbuhkan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tahun ini} - \text{jumlah tahun lalu}}{\text{jumlah tahun lalu}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah produksi usaha pertanian tahun ini dan tahun lalu
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei

3.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Timbulan sampah yang ditangani	
Kode Data	-
Nama Data	Timbulan sampah yang ditangani
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah.
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	Jumlah total volume sampah yang dapat ditangani

Variabel Pembentuk Indikator	Jumah seluruh total volume timbunan sampah tahun berjalan Kab/Kota
Ukuran	Berat
Satuan	Kg
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Data bersumber dari data primer dan data sekunder
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan	
Kode Data	-
Nama Data	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Fasilitas pengurangan sampah
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Tersedianya informasi terkait jumlah TPST}}{\text{Jumlah sampah pada masing – masing lingkungan}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Tersedianya data dan informasi pengurangan sampah diwilayah kab/kota
Ukuran	Jumlah
Satuan	m ³
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (Data bersumber dari data primer dan data sekunder)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang

	berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$IKLH = (IKA\ 30\%) + (IKD\ 30\%) + (ITH\ 40\%)$
Variabel Pembentuk Indikator	Hasil Nilai IKLH Kab/kota
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil pengukuran pemantauan kualitas air dan kualitas udara. Data sekunder berasal dari hasil interpretasi satelit tutupan lahan
Presentase jumlah sampah yang ditangani	
Kode Data	-
Nama Data	Presentase jumlah sampah yang ditangani
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah.
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Total Volume Sampah Yang Dapat Ditangani}}{\text{Jumlah Seluruh Total Volume Timbunan Sampah Tahun Berjalan Kab/Kota}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Sampah Yang Dapat Ditangani
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Survey. Menggunakan kuisisioner yang diajukan kepada responden. Kuisisioner ini terdiri atas tiga komponen yaitu, cara dan kebiasaan mengelola sampah, kebiasaan tempat membuang sampah, dan presepsi dan sikap.
Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	
Kode Data	-
Nama Data	Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah saha dan atau kegiatan yang izin}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab/kota
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	
Kode Data	-
Nama Data	Peningkatan Indeks Kulaitas Udara
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Indeks kualitas udara digunakan dengan ukuran yang untuk menilai pencemaran udara
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$IKU = 100 \left(\frac{50}{0.9} \times (leu - 0.1) \right)$

Variabel Pembentuk Indikator	Hasil Perhitungan Kab/kota terhadap IKU
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sampling. Menggunakan data parameter NO ₂ dan SO ₂ dengan metode passive sampler
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
Kode Data	-
Nama Data	Peningkatan Indeks Kulaitas Tutupan Lahan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH)
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - \left(\frac{84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW - DKK} \right) \times 100 \right)}{54,3} \right) \times 50$
Variabel Pembentuk Indikator	Hasil Perhitungan Kab/kota terhadap IKTL
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Data penutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi Landsat liputan, Persentase perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah administasi kab/kota
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Lingkungan Hidup
Konsep/Definisi	Pengaduan merupakan penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu

	kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.
Level Estimasi	Kabupaten / kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Jumlah laporan pengaduan masyarakat

3.11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL)

Jumlah penduduk ber-KTP dan atau akte nikah	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah penduduk ber-KTP dan atau akte nikah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Jumlah penduduk ber-KTP dan atau akta nikah merupakan suatu konsep yang mengacu pada jumlah individu dalam suatu wilayah atau negara yang terdaftar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau akta nikah. KTP adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas, sementara akta nikah adalah dokumen

	resmi yang mendaftarkan perkawinan yang sah di Indonesia.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah penduduk ber-KTP dan atau akte nikah
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Individu, KTP, Akta Nikah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dan Kompilasi Data
Jumlah anak berakte kelahiran (0-18 tahun)	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah anak berakte kelahiran (0-18 tahun)
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Konsep "Jumlah anak berakte kelahiran (0-18 tahun)" merujuk pada jumlah anak yang telah terdaftar dalam suatu wilayah atau negara dengan memiliki akta kelahiran resmi. Konsep ini hanya mencakup anak-anak yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Akta kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah setempat yang mendaftarkan kelahiran seseorang. Data mengenai jumlah anak berakte kelahiran dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti perencanaan pembangunan, peningkatan kesejahteraan anak-anak, serta pengambilan keputusan terkait kebijakan publik yang berkaitan dengan anak.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah anak berakte kelahiran (0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah anak berakte kelahiran (0-18 tahun) yang memiliki akta kelahiran
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dan Kompilasi Data

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	
Kode Data	-
Nama Data	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Sudah/belum penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Pengukuran ini memiliki fungsi untuk Untuk mengetahui sudah atau belum penerapan KTP nasional berbasis NIK.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Ukuran	Jumlah
Satuan	KTP, NIK
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dan Kompilasi Data
Jumlah Penduduk Wanita	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Penduduk Wanita
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Jumlah Penduduk berjenis kelamin wanita di kabupaten Pacitan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Wanita
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk, Jenis kelamin, Jumlah penduduk wanita
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dan Kompilasi Data
Jumlah Penduduk Pria	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Penduduk Pria
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Jumlah Penduduk berjenis kelamin wanita di kabupaten Pacitan

Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk Pria
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk, Jenis kelamin, Jumlah penduduk pria
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dan Kompilasi Data
Jumlah Kematian	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kematian
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Konsep "Jumlah Kematian" merujuk pada jumlah orang yang meninggal dunia dalam kabupaten Pacitan. Konsep ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kematian dan mortalitas dalam suatu populasi. Data mengenai jumlah kematian ini biasanya digunakan untuk berbagai macam tujuan, seperti perencanaan kesehatan, pengambilan keputusan terkait kebijakan publik, dan analisis sosial ekonomi.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Penduduk yang Meninggal Dunia
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Penduduk yang Meninggal Dunia
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Jumlah Kelahiran	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kelahiran
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)
Konsep/Definisi	Jumlah kelahiran merujuk pada jumlah orang yang lahir di kabupaten Pacitan dalam suatu cakupan periode tertentu. Konsep ini dapat digunakan untuk

	mengukur tingkat kelahiran dan natalitas dalam suatu populasi.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah bayi yang lahir
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah bayi yang lahir
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.12 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (PMD)

Persentase Desa Mandiri	
Kode Data	-
Nama Data	Presentase Desa Mandiri
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep/Definisi	Bertambahnya jumlah Desa Mandiri menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah desa.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah desa (Maju + mandiri sebelum 2021)}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep/Definisi	Tindakan Pemerintah daerah untuk melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.
Level Estimasi	Desa
Rumus Perhitungan	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa \times 100%

Variabel Pembentuk Indikator	Penyelenggaraan Penataan Desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Persentase Kerjasama Desa	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Kerjasama Desa
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep/Definisi	Kerjasama desa dimaksudkan untuk menunjang PAdes.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kerjasama Desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kerjasama Desa dan Jumlah Desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep/Definisi	Kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa yang berkualitas adalah kemampuan aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Berkualitas}}{\text{Jumlah total aparatur desa}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa yang Berkualitas

	Jumlah total aparaturnya desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Terlibat dalam Pembangunan Desa	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Terlibat dalam Pembangunan Desa
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Konsep/Definisi	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Terlibat dalam Pembangunan Desa \times 100%
Variabel Pembentuk Indikator	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Terlibat dalam Pembangunan Desa
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi Data

3.13 DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan
Konsep/Definisi	Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang,

	huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2014.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Rambu-rambu Lalu Lintas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Buah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan
Konsep/Definisi	Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kendaraan}}{\text{Panjang Kendaraan}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan
Ukuran	Rasio
Satuan	Unit/Km
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei. Pengambilan data di SAMSAT dan PUPR
Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan

Konsep/Definisi	Jumlah kumpulan rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit kendaraan
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Rekap Laporan Hasil Uji KIR
Jumlah terminal Bus	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah terminal Bus
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan
Konsep/Definisi	Menyatakan jumlah terminal Bus Tipe C di Kab. Pacitan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah Terminal Bus Tipe C
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Terminal Bus Tipe C
Ukuran	Jumlah
Satuan	Titik/Lokasi
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Kendaraan Bermotor	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kendaraan Bermotor
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan
Konsep/Definisi	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pacitan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	<p><i>Jumlah kendaraan bermotor =</i></p> $\Sigma \text{ mobil penumpang} + \Sigma \text{ bus} + \Sigma \text{ Truk} + \Sigma \text{ sepeda motor}$

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang), Jumlah Kendaraan Bermotor (Bus), Jumlah Kendaraan Bermotor (truk), Jumlah Kendaraan Bermotor (sepeda motor)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei. Laporan dari SAMSAT
Jumlah orang terangkut angkutan umum	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah orang terangkut angkutan umum
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perhubungan
Konsep/Definisi	Jumlah penumpang angkutan umum yang melalui terminal terminal yang tersedia.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah orang terangkut angkutan umum
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah orang terangkut angkutan umum
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Data kinerja terminal

3.14 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Presentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Presentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kominfo
Konsep/Definisi	Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dengan

	Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kominfo
Konsep/Definisi	Sertifikat Elektronik adalah tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang memanfaatkan sertifikat elektronik merupakan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan publik serta layanan administrasi yang terintegrasi dalam sertifikat elektronik.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$ Keterangan : SPBE (Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik)

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kominfo
Konsep/Definisi	Pusat data atau data center adalah fasilitas untuk menempatkan sistem komputer, cadangan informasi, server website atau database, dan komponen terkait lainnya. Persentase (%) perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat merupakan perangkat daerah yang ikut serta menggunakan layanan yang ada di pusat data pemerintahan.
Level Estimasi	Provinsi
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah pengguna layanan pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
Kode Data	-

Nama Data	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kominfo
Konsep/Definisi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah merupakan jumlah OPD yang dalam penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data statistik yang tersedia
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah OPD menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Indeks Daya Saing Pariwisata	
Kode Data	-
Nama Data	Indeks Daya Saing Pariwisata
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Kominfo
Konsep/Definisi	Indeks Daya Saing Pariwisata adalah mengukur capaian kapasitas usaha pariwisata untuk menarik pengunjung asing maupun domestik yang berkunjung pada suatu tujuan wisata
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$Z^c = Z^c \sum W^k Y_k^c$ Z^c = Daya Saing Pariwisata W^k = Bobot Asosiasi pada setiap indikator Y_k^c = Perhitungan penjumlahan bobot asosiasi setiap indikator
Variabel Pembentuk Indikator	1. Indikator Pengaruh Pariwisata (Human Tourism Indicator/HTI) ➤ Jumlah wisatawan (turis)

	<p>2. Indikator Pengaruh Harga (Price Competitiveness Indicator/PCI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah wisatawan mancanegara, rata-rata tarif hotel dan rata-rata masa tinggal <p>3. Indikator Pengembangan Infrastruktur (Infrastructure Development Indicator/IDI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah kualitas jalan baik dan jumlah jalan beraspal <p>4. Indikator Lingkungan (Environment Indicator/EI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah penduduk dan luas daerah <p>5. Indikator Kemajuan Teknologi (Technology Advancement Indicator/TAI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Persentase rumah tangga yang mengakses penggunaan internet termasuk sosial media <p>6. Sumber Daya Manusia (Human Resources Indicator/HRI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penduduk bebas buta huruf dan penduduk berpendidikan SD, SMP, SMA, Diploma & Sarjana <p>7. Indikator Keterbukaan (Openess Indicator/OI)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah wisatawan mancanegara dan total PAD <p>8. Indikator Pembangunan Sosial (Social Development Indicator/SDI)</p> <p>Rata-rata masa tinggal wisatawan domestik dan mancanegara di destinasi wisata</p>
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data. Mengumpulkan dan mengolah data dari 8 indikator, kompilasi data dari dinas terkait

3.15 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, DAN PERINDUSTRIAN

Persentase Koperasi Aktif	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Koperasi Aktif
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian

Konsep/Definisi	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi Yang Ada}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan RAT (Data Sekunder)
Pertumbuhan Industri	
Kode Data	-
Nama Data	Pertumbuhan Industri
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Konsep/Definisi	Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapat keuntungan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } N - \text{jumlah Industri kecil dan menengah tahun } (N-1)}{\text{jumlah industri kecil dan menengah tahun } N-1} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n dan tahun (n-1)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data produk administrasi
Rasio kewirausahaan	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio kewirausahaan
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian

Konsep/Definisi	Rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha pemula dan mapan terhadap populasi angkatan kerja Indonesia. Dimana wirausaha pemula adalah Warga Negara Indonesia yang memulai kegiatan berwirausaha dalam kategori usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu kurang dari 42 bulan sejak terdaftar di lembaga perizinan usaha sedangkan wirausaha mapan adalah wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Populasi wirausaha pemula} + \text{wirausaha mapan}}{\text{Populasi angkatan kerja}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah wirausaha pemula - Jumlah wirausaha mapan - Jumlah angkatan kerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei Lapangan

3.16 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PMPTSP)

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional
Unit Kerja Penghasilan	Dinas PMPTSP
Konsep/Definisi	Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh nilai investasi di Kabupaten Pacitan

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh nilai investasi di Kab. Pacitan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data. Laporan OSS RBA dan LKPM, APBD Kab., APBD Prov. APBN
Nilai Realisasi Penanaman Modal	
Kode Data	-
Nama Data	Nilai Realisasi Penanaman Modal
Unit Kerja Penghasilan	Dinas PMPTSP
Konsep/Definisi	Aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Nilai Realisasi Penanaman Modal
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah nilai Realisasi Penanaman Modal
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data. Laporan OSS RBA dan LKPM

3.17 DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kawasan Wisata	
Kode Data	-
Nama Data	Kawasan Wisata
Unit Kerja Penghasilan	Bidang pengembangan pariwisata
Konsep/Definisi	Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota

Rumus Perhitungan	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun desa
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Pacitan baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun desa
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Grup Kesenian	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah grup kesenian
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Grup kesenian adalah salah satu tempat yang memerlukan suatu konsep manajemen, karena kegiatan di dalam sanggar tidak hanya sebatas memproduksi atau menghasilkan karya seni, namun dalam proses produksi tersebut terdapat tahap- tahap yang harus dilalui.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah grup kesenian yang terdaftar
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah grup kesenian yang terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.
Jumlah Jenis Budaya	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah grup kesenian
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Jenis budaya Secara garis besar, jenis kebudayaan dibagi menjadi dua, antara lain kebudayaan material (lahir) dan kebudayaan imaterial (batin). Kebudayaan material atau lahir adalah kebudayaan ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret

	seperti tradisi tedak siten pada masyarakat Jawa.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah jenis budaya
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah jenis budaya
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kali pertunjukkan
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Unit Kerja Penghasil	Bidang Pemuda dan Olahraga
Konsep/Definisi	Pemuda yang aktif (16-30 tahun) adalah pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi (PPI, karangtaruna, KNPI, Gerakan pramuka, dan organisasi lainnya)
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh pemuda}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pemuda yang Aktif • Jumlah seluruh pemuda
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (data pemuda dari Dukcapil, koordinasi dengan KNPI)
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	
Kode Data	-
Nama Data	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Unit Kerja Penghasil	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Festival seni dan budaya adalah penyelenggaraan festival seni budaya daerah
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh penyelenggaraan festival seni dan budaya
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh penyelenggaraan festival seni dan budaya

Ukuran	Jumlah
Satuan	Kali pertunjukkan
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
PAD Sektor Pariwisata	
Kode Data	-
Nama Data	PAD Sektor Pariwisata
Unit Kerja Penghasil	Disparbudpora
Konsep/Definisi	PAD sektor pariwisata adalah penempatan asli daerah dari sektor pariwisata
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah retribusi pariwisata milik Pemda
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah retribusi pariwisata milik Pemda
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei (rekapitulasi data PAD yang masuk)
Lama Kunjungan Wisata (Leng of Stay)	
Kode Data	-
Nama Data	Lama Kunjungan Wisata (Leng of Stay)
Unit Kerja Penghasil	Bidang SDM dan Pemasaran
Konsep/Definisi	Lama hari wisatawan di Hotel
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah lama hari tinggal wisatawan di hotel
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah lama hari tinggal wisatawan di hotel
Ukuran	Jumlah
Satuan	Hari
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Kunjungan Wisata	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kunjungan Wisata
Unit Kerja Penghasil	Bidang SDM dan Pemasaran
Konsep/Definisi	Jumlah kunjungan mancanegara dan nusantara di Pacitan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Pacitan

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Pacitan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (rekapitulasi dari DTW milik Pemda, desa, maupun swasta)
Prestasi/Perolehan Medali Olahraga	
Kode Data	-
Nama Data	Prestasi/Perolehan Medali Olahraga
Unit Kerja Penghasil	Bidang Pemuda dan Olahraga
Konsep/Definisi	Prestasi olahraga adalah perolehan medali dari perlombaan olahraga
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah medali (emas, perak, perunggu) yang didapatkan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah medali (emas, perak, perunggu) yang didapatkan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Medali
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (rekapitulasi data dari KONI)
Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemda	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemda
Unit Kerja Penghasil	Bidang Pemuda dan Olahraga
Konsep/Definisi	Gedung olahraga adalah bangunan tertutup yang dimanfaatkan sebagai sarana olahraga
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh gedung olahraga milik pemda
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh gedung olahraga milik pemda
Ukuran	Jumlah
Satuan	Gedung
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Gedung Kesenian Milik Pemda	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah seluruh gedung olahraga milik pemda

Unit Kerja Penghasil	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Gedung Kesenian adalah bangunan tertutup yang dimanfaatkan untuk kesenian dan kebudayaan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh gedung kesenian milik pemda
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh gedung kesenian milik pemda
Ukuran	Jumlah
Satuan	Gedung
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Atlet Berprestasi	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Atlet Berprestasi
Unit Kerja Penghasil	Bidang Pemuda dan Olahraga
Konsep/Definisi	Atlet berprestasi adalah jumlah atlet cabang olahraga yang berprestasi
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh atlet cabang olahraga yang berprestasi
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh atlet cabang olahraga yang berprestasi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi (Rekapitulasi)
Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	
Kode Data	-
Nama Data	Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Unit Kerja Penghasil	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Ukuran	Jumlah

Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Event Kebudayaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Event Kebudayaan
Unit Kerja Penghasil	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Merupakan event kebudayaan dengan skala besar dan berdampak langsung kepada masyarakat serta dilaksanakan di Kabupaten Pacitan
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh event budaya
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh event budaya
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kali pertunjukkan
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Perentase Warisan Budaya Tak Benda yang Telah Ditetapkan terhadap Total Registrasi	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
Unit Kerja Penghasil	Bidang Kebudayaan
Konsep/Definisi	Warisan budaya takbenda adalah praktik representasi ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrument, objek artefak, dan ruang budaya yang dianggap oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah seluruh warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan dan telah registrasi}}{\text{Jumlah seluruh warisan budaya}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah seluruh warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan dan telah registrasi • Jumlah seluruh warisan budaya
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen

Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Wisatawan Mancanegara	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Wisatawan Mancanegara
Unit Kerja Penghasil	Bidang SDM dan Pemasaran
Konsep/Definisi	Wisatawan mancanegara adalah pengunjung wisata dari luar negeri
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh wisatawan mancanegara
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh wisatawan mancanegara
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang/jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
Unit Kerja Penghasil	Bidang SDM dan Pemasaran
Konsep/Definisi	Wisatawan nusantara adalah pengunjung wisata dari dalam negeri
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh wisatawan nusantara
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah seluruh wisatawan nusantara
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang/jiwa
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survei

3.18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jumlah Pengunjung Rata-Rata Perpustakaan per Tahun	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pengunjung Rata-Rata Perpustakaan per Tahun
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Konsep/Definisi	Perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan

	terbitan lainnya yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca bukan untuk dijual.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah total pengunjung dalam 3 tahun terakhir}}{3}$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Pengunjung
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Unit Kerja Penghasilan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Konsep/Definisi	Perpustakaan merupakan sebuah ruangan atau gedung yang dipakai untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan berdasarkan tata susunan tertentu yang dipakai pembaca bukan untuk dijual.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	<i>Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah + jumlah pengunjung perpustakaan sekolah, desa kelurahan, perguruan tinggi dan khusus kabupaten pacitan dalam 1 tahun</i>
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Pengunjung
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)

3.19 DINAS PERIKANAN

Jumlah Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah produksi perikanan kelompok nelayan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap
Konsep/Definisi	Produksi ikan kelompok nelayan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan yang dilakukan oleh komunitas nelayan yaitu kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa- desa atau pesisir.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah hasil penangkapan ikan kelompok nelayan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah hasil penangkapan ikan kelompok nelayan
Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Menggunakan sensus dimana penyuluh datang ke kelompok nelayan untuk mengambil data
Jumlah Produksi Perikanan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Produksi Perikanan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya
Konsep/Definisi	Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan

	oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Selanjutnya jumlah budidaya dan tangkap dijadikan satu.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah produksi perikanan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penangkapan ikan
Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan Ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Sensus dengan enumerator
Penggunaan Lahan untuk Kawasan Budidaya	
Kode Data	-
Nama Data	Penggunaan Lahan untuk Kawasan Budidaya
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Budidaya
Konsep/Definisi	Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Luas lahan untuk kawasan budidaya
Variabel Pembentuk Indikator	Luas lahan untuk kawasan budidaya
Ukuran	Luas
Satuan	m ²
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Pengukuran kolam dan pencatatan
Jumlah Kelompok Nelayan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Kelompok Nelayan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap
Konsep/Definisi	Kelompok perikanan dan nelayan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap (PKS) pelaku utama dan pelaku usaha sehingga lebih meningkatkan

	kemampuan dan kemandirian di dalam mengelola usaha perikanan dan penangkapan ikan . Agar pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha dibidang perikanan dan nelayan di tingkat lapangan melalui pendekatan kelompok dengan tujuan berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya satu gerak, satu bahasa, dan satu pengertian dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan perikanan.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah kelompok nelayan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kelompok nelayan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kelompok
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey. Update melalui aplikasi, ada enumerator
Produksi Perikanan Tangkap	
Kode Data	-
Nama Data	Produksi Perikanan Tangkap
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap
Konsep/Definisi	Perikanan tangkap, berbeda dengan perikanan budi daya, adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar. Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah perikanan tangkap
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perikanan tangkap
Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan Ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput
Produksi Perikanan Budidaya	
Kode Data	-

Nama Data	Produksi Perikanan Budidaya
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Budidaya
Konsep/Definisi	Perikanan budidaya adalah kegiatan memproduksi biota (organisme) akuatik (air) untuk men-dapatkan keuntungan. Selain budidaya perikanan, dalam sektor perikanan produksi biota akuatik dapat dilakukan melalui penangkapan atau perikanan tangkap.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah perikanan budidaya
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perikanan budidaya
Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan Ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput
Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (Sumber daya Kelautan Perikanan)	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP (Sumber daya Kelautan Perikanan)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap
Konsep/Definisi	Kelompok masyarakat pengawas adalah pihak yang mengawasi pesisir, sumber daya di pesisir yang mana bentuk kegiatannya berupa pelatihan dan sosialisasi.
Level Estimasi	Kecamatan
Rumus Perhitungan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kelompok masyarakat pengawas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kelompok
Referensi Waktu	Insidental

Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput
Konsumsi Ikan	
Kode Data	-
Nama Data	Konsumsi Ikan
Unit Kerja Penghasilan	Pengelolaan Produk Perikanan
Konsep/Definisi	Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi sebagai pangan oleh manusia. Ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan yaitu dari laut dan dari perairan di darat.
Level Estimasi	Provinsi
Rumus Perhitungan	Jumlah konsumsi perkapita
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah konsumsi perkapita
Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan Ton
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput dan sensus
Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Sertifikat GMP
Unit Kerja Penghasilan	Pengelolaan Produk Perikanan
Konsep/Definisi	SKP Adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik / GMP (<i>Good Manufacturing Practices</i>) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure (SSOP)).
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah sertifikat terbit
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah sertifikat terbit
Ukuran	Jumlah
Satuan	Sertifikat
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Tiap ada yang mengajukan dan terbit akan didampingi
Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Perikanan Tangkap
Konsep/Definisi	Nilai produksi adalah nilai pada waktu hasil penangkapan/budidaya didaratkan. Jadi harga yang digunakan adalah harga produsen. Penangkapan ikan adalah kegiatan menangkap atau mengumpulkan ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang hidup di laut/perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah keseluruhan total nilai produksi perikanan tangkap
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah keseluruhan total nilai produksi perikanan tangkap
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput
Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah produksi hasil olahan perikanan
Unit Kerja Penghasilan	Pengelolaan produk perikanan
Konsep/Definisi	Produk hasil olahan perikanan merupakan hasil kekayaan alam indonesia yang melimpah dan memiliki potensi cukup baik untuk dimanfaatkan.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah produksi hasil olahan perikanan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah produksi hasil olahan perikanan

Ukuran	Berat
Satuan	Kg dan Ton
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput
Jumlah Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Nilai Produksi Hasil Olahan Perikanan
Unit Kerja Penghasilan	Pengelolaan produk perikanan
Konsep/Definisi	Nilai produksi Hasil Olahan Perikanan adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi perikanan, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut.
Level Estimasi	Kabupaten
Rumus Perhitungan	Jumlah nilai produksi hasil olahan perikanan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah nilai produksi hasil olahan perikanan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Enumerator ke bidang baru diinput

3.20 DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Tingkat Pengangguran Terbuka	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Penganggur terbuka, terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota

Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pengangguran Jumlah angkatan kerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$TPAK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk bekerja Jumlah penduduk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (menggambil data dari dinas lain).
Rasio Penduduk yang Bekerja	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Penduduk yang Bekerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15

	tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio penduduk yang bekerja adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang bekerja terhadap keseluruhan penduduk.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$Rasio = \frac{Jumlah\ penduduk\ bekerja}{Jumlah\ penduduk\ usia\ produktif} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Penduduk yang Bekerja Jumlah Seluruh Penduduk Usia Produktif
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan lowongan pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$Persentase = \frac{\Sigma\ Penduduk\ usia\ \geq\ 15}{\Sigma\ Angkatan\ kerja\ \geq\ 15} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk bekerja usia 15 tahun ke atas dan Jumlah angkatan bekerja usia 15 tahun ke atas
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	
Kode Data	-
Nama Data	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Perbandingan antara tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga dengan total kesempatan kerja
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga}}{\Sigma \text{Seluruh kesempatan kerja}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga Jumlah Seluruh kesempatan kerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Partisipasi angkatan kerja perempuan	
Kode Data	-
Nama Data	Partisipasi angkatan kerja perempuan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Penduduk perempuan yg bekerja}}{\Sigma \text{Penduduk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk perempuan yang bekerja Jumlah penduduk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	
Kode Data	-
Nama Data	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Pelatihan kewirausahaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mengembangkan pengetahuan, bakat, keterampilan, serta sikap dengan menerapkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan kesempatan yang dihadapi serta memecahkan masalah di lapangan dengan simulasi pada pelatihan.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Variabel Pembentuk Indikator	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Tenaga kerja (orang)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu.
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	
Kode Data	-
Nama Data	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
Ukuran	Jumlah
Satuan	Tenaga kerja (orang)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
Kode Data	-
Nama Data	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah seluruh pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pencari kerja (orang)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	
Kode Data	-
Nama Data	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap berbagai resiko pasar tenaga kerja. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek yaitu angka yang menunjukkan jumlah besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek
Level Estimasi	Kabupaten/Kota

Rumus Perhitungan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
Ukuran	Jumlah
Satuan	Pekerja (orang)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	
Kode Data	-
Nama Data	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Ukuran	Jumlah
Satuan	Kasus
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	
Kode Data	-
Nama Data	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan sengketa pengusaha-pekerja yang terjadi per tahunnya
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kasus sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Ukuran	Jumlah
Satuan	Kasus
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Ukuran	Jumlah
Satuan	Tenaga Kerja (orang)
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Pertahun
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Ukuran yang dapat menggambarkan tingginya jumlah perempuan yang bekerja.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Penduduk perempuan bekerja}}{\Sigma \text{Penduduk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah penduduk perempuan yang bekerja dan jumlah penduduk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu

Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultasi dan pengukuran produktivitas
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit

Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama laporan dari perusahaan	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama laporan dari perusahaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama laporan dari perusahaan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama laporan dari perusahaan
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama laporan dari perusahaan
Ukuran	Jumlah
Satuan	Unit
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
Ukuran	Jumlah

Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	
Kode Data	-
Nama Data	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Ukuran	Jumlah
Satuan	Posisi
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja	
Kode Data	-

Nama Data	Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Ukuran	Jumlah
Satuan	Orang
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Survey, metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu
Persentase tenaga kerja formal	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase tenaga kerja formal
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan Persentase tenaga kerja formal
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\Sigma \text{Tenaga kerja formal}}{\Sigma \text{Tenaga kerja}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah tenaga kerja formal Jumlah seluruh tenaga kerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Upah rata-rata per jam pekerja	
Kode Data	-
Nama Data	Upah rata-rata per jam pekerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja

Konsep/Definisi	Angka yang menunjukkan besarnya Upah rata-rata per jam pekerja.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Rumus yang digunakan untuk melakukan perhitungan upah per jam merujuk pada peraturan pemerintah ialah Upah dengan pembayaran per jam dihitung dengan besarnya upah sebulan dibagi dengan 126.
Variabel Pembentuk Indikator	Upah per jam
Ukuran	Jumlah
Satuan	Rupiah
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.
Level Estimasi	Provinsi
Rumus Perhitungan	$\frac{\Sigma \text{ Pengangguran berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur}}{\Sigma \text{ angkatan kerja}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	- Jumlah Pengangguran berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur - Jumlah Angkatan Kerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (menggambil data dari dinas lain)
Tingkat setengah pengangguran	
Kode Data	-
Nama Data	Tingkat setengah pengangguran
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat utilisasi lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$TSP = \frac{PBJK < 35}{PB} \times 100\%$ <p>Keterangan: TSP: Tingkat setengah pengangguran (%) PBJK<35: Jumlah pekerja yang tergolong setengah penganggur (orang) PB: Jumlah penduduk yang bekerja (orang)</p>
Variabel Pembentuk Indikator	PBJK<35: Jumlah pekerja yang tergolong setengah penganggur (orang) PB: Jumlah penduduk yang bekerja (orang)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (menggambil data dari dinas lain)
Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	
Kode Data	-

Nama Data	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Tenaga Kerja
Konsep/Definisi	Mengukur potensi penduduk usia muda untuk masuk ke pasar kerja, termasuk pekerja usia muda yang putus asa (discouraged worker) dan kaum muda yang bukan angkatan kerja karena disabilitas, mengurus rumah tangga, dan lain-lain. Indikator ini dapat memberi sinyal dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan keahlian bagi kaum muda, serta fasilitasi kemudahan transisi ke pasar kerja, termasuk penyediaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$PrNEET = \frac{PTB\ 15 - 24 + PTS\ 15 - 24 + PTT\ 15 - 24}{P\ 15 - 24} \times 100\%$ <p>Keterangan: Pr NEET: Persentase penduduk usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (%) PTS15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang) PTB15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang) PTT15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang) P15-24: Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang)</p>
Variabel Pembentuk Indikator	PTS15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak sekolah (orang) PTB15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak bekerja (orang) PTT15-24: Jumlah penduduk usia muda yang tidak mengikuti training/pelatihan (orang)

	P15-24: Jumlah penduduk usia 15-24 tahun (orang)
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (menggambil data dari dinas lain)

3.21 SEKRETARIAT DAERAH

Persentase capaian penerapan SPM di Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase capaian penerapan SPM di Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama
Konsep/Definisi	Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah total capaian penerapan}}{\text{Jumlah total bidang penerapan SPM di Daerah}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah total persentasi capaian penerapan Jumlah total bidang penerapan SPM di Daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan.
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	
Kode Data	-
Nama Data	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Unit Kerja Penghasilan	Bagian Organisasi
Konsep/Definisi	Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Total Nilai Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$
Variabel Pembentuk Indikator	Total Nilai Per unsur Total unsur yang terisi Nilai penimbang
Ukuran	Indeks
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan.
Persentase Pengadaan Barang jasa yang dilakukan dengann metode kompetitif	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Pengadaan Barang jasa yang dilakukan dengann metode kompetitif
Unit Kerja Penghasilan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Konsep/Definisi	Pengadaan barang/jasa (procurement) adalah adalah proses suatu organisasi memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan internal dan/atau eksternal organisasi. Prosentase pengadaan barang jasa yang dilakukan dengann metode kompetitif merupakan untuk mengukut tingkat pengadaan barang jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan kompetitif (tender)}}{\text{Jumlah total pengadaan}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan kompetitif (tender) Jumlah total pengadaan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan.
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan
Unit Kerja Penghasilan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Konsep/Definisi	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan merupakan untuk mengetahui tingkat pengadaan barang jasa melalui pengadaan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah belanja barang jasa dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Jumlah belanja barang jasa dan modal}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah belanja barang jasa dan modal yang melalui pengadaan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan.

3.22 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Disetujui	
Kode Data	-
Nama Data	RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) Disetujui
Unit Kerja Penghasilan	Bagian Persidangan dan Risalah
Konsep/Definisi	RAPERDA disetujui merupakan usulan rancangan peraturan daerah dari eksekutif maupun legislatif akan di tindak lanjutin dari perumusan, pembasan sampai disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan daerah.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Raperda yang disetujui}}{\text{Usulan Raperda}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah Dokumen Perda yang disetujui, Jumlah usulan Raperda
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Mencari data Raperda yang di usulkan dan Raperda yang disetujui pada tahun tersebut

3.23 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDALITBANG)

Persentase Rekomendasi Kelitbangan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Perencanaan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Rekomendasi Kelitbangan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Perencanaan
Unit Kerja Penghasilan	Bidang LITBANG
Konsep/Definisi	Persentase rekomendasi kelitbangan sebagai dasar penentuan kebijakan perencanaan digunakan untuk menghimpun inovasi dari bermacam OPD ataupun

	masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa sub - indikator yaitu persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan, persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan, persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Kajian}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kajian/penelitian yang dimanfaatkan Jumlah kajian
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Keselarasan Program RPJMD Kedalam RKPD
Unit Kerja Penghasilan	Bidang RENDALEV
Konsep/Definisi	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Di sisi lain, penyusunan RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJM Nasional. Lebih lanjut, Undang Undang No 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud adalah RPJPD, RPJMD, dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kesulitan yang muncul dalam penyusunan RPJMD

	adalah dalam hal mengkaitkan berbagai dokumen pembangunan serta menentukan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu pelatihan penyusunan RPJMD.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah program RKPD Jumlah program RPJMD
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Ketercapaian Program Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit Kerja Penghasilan	Bidang PPM
Konsep/Definisi	Persentase ketercapaian program bidang pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program bidang pengembangan sumber daya manusia. Hal ini akan mempertimbangkan beberapa sub-komponen meliputi jumlah koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pengembangan usaha.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ketercapaian program OPD dibawah bidang PPM}}{\text{Jumlah program OPD dibawah bidang PPM}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah ketercapaian program OPD dibawah bidang PPM Jumlah program OPS dibawah bidang PPM
Ukuran	Persentase

Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tiga bulan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi laporan
Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Unit Kerja Penghasilan	Bidang ESDAIW
Konsep/Definisi	Persentase Ketercapaian Program Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program bidang perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ketercapaian program OPD dibawah bidang ESDIW}}{\text{Jumlah program OPD dibawah bidang ESDIW}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah program bidang perekonomian, SDA dan Infrastruktur
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tiga bulan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi laporan
Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD
Unit Kerja Penghasilan	Bidang LITBANG
Konsep/Definisi	Persentase Hasil Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan dan Diseminasi) yang dimanfaatkan oleh PD Merupakan upaya yang bertujuan untuk menghimpun inovasi dari berbagai macam OPD

	<p>ataupun masyarakat. Pengukuran ini mempertimbangkan beberapa sub-indikator, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan - Persentase hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan - Persentase hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Melalui kompilasi dari beberapa sub-indikator yang dihitung. Selanjutnya dihitung persentase antara aspek terealisasi dibagi aspek keseluruhan
Variabel Pembentuk Indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Kelitbangan bidang sosial - Kelitbangan bidang ekonomi - Kelitbangan bidang inovasi dan teknologi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Dinas
Konsep/Definisi	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya untuk mengukur nilai SAKIP Bappedalitbang, beberapa dokumen yang dikumpulkan, dan dinilai (contoh: LKJIP, Perjanjian Kinerja). Proses penilaian akan dilakukan tim SAKIP. Bappedalitbang memiliki tugas untuk melakukan input data yang diperlukan. Secara lebih detail, berikut adalah komponen yang dipertimbangkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah - Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah - Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian - Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi

	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan - Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan - Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Hasil didapatkan berdasarkan kompilasi persentase dari berbagai macam komponen
Variabel Pembentuk Indikator	Dokumen perencanaan, laporan kinerja daerah, dokumen keuangan, pegawai, layanan kepegawaian, operasional dasar, persentase penyediaan jasa, kualitas barang milik daerah.
Ukuran	Jumlah
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi data
Persentase Perencanaan Kinerja	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Perencanaan Kinerja
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Rendalev
Konsep/Definisi	Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	AKIP PEMDA
Variabel Pembentuk Indikator	Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen

Referensi Waktu	Bulanan
Metode Pengumpulan Data	Pengumpulan data dilakukan secara kompilasi. Data yang diolah adalah pelaporan seluruh OPD yang diunggah melalui aplikasi Simolek

3.24 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Pajak Daerah Dan Bidang Pendapatan
Konsep/Definisi	Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penilaian penetapan pajak Daerah, serta penagihan dan keberatan pajak Daerah.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{PAD \text{ tahun ke-}n}{Pendapatan \text{ tahun ke-}n} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	PAD tahun ke-n Pendapatan tahun ke-n
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)
Pertumbuhan PAD	
Kode Data	-
Nama Data	Pertumbuhan PAD
Unit Kerja Penghasilan	Badan Keuangan Daerah
Konsep/Definisi	Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

	mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 tahun 2009).
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{PAD\ tahun\ n - PAD\ tahun\ n-1}{Pendapatan\ tahun\ n-1} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	PAD tahun ke-n dan PAD tahun n-1 Pendapatan tahun ke-n
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi, metode pengumpulan data dengan menyusun data dari gabungan survey dan sensus (mengambil data dari dinas lain)

3.25 **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Nilai Indeks Sistem Merit	
Kode Data	-
Nama Data	Nilai Indeks Sistem Merit
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

	Nilai indeks sistem merit untuk mengukur tingkat capaian pengelolaan manajemen ASN.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai indeks sistem merit}}{\text{Nilai keseluruhan indeks sistem merit}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai indeks sistem merit Nilai keseluruhan indeks sistem merit
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Inventarisasi bukti pendukung pelaksanaan sistem merit dan pengolahan data berbasis aplikasi
Rasio Nilai aspek Evaluasi Kinerja ASN dari Indeks Sistem Merit	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio Nilai aspek Evaluasi Kinerja ASN dari Indeks Sistem Merit
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Penilaian kinerja ASN bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai indeks sistem merit aspek kinerja ASN}}{\text{Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek kinerja ASN}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai indeks sistem merit aspek kinerja ASN Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek kinerja ASN
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan

Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Inventarisasi bukti pendukung pelaksanaan sistem merit dan pengolahan data berbasis aplikasi
Nilai keseluruhan Indeks Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi	
Kode Data	-
Nama Data	Nilai keseluruhan Indeks Sistem Merit Aspek Mutasi dan Promosi
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Pada prinsipnya sebagai ASN kita sudah berjanji untuk siap ditugaskan di mana saja di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, kalau tidak siap tentunya kita tidak menjadi ASN. Mutasi dan Promosi adalah hal yang sangat wajar dalam sebuah organisasi disamping untuk penyegaran kegiatan tersebut juga akan berdampak pada peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dan keahlian ASN yang bersangkutan sehingga ketika ada kesempatan untuk menjadi pejabat, maka ia akan menjadi pejabat yang komprehensif dalam keilmuan dan kemampuan sehingga akan berdampak pada pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai indeks sistem merit aspek Mutasi dan Promosi}}{\text{Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek Mutasi dan Promosi}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai indeks sistem merit aspek mutasi dan promosi Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek mutasi dan promosi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Inventarisasi bukti pendukung pelaksanaan sistem merit dan pengolahan data berbasis aplikasi
Rasio Nilai aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit	

Kode Data	-
Nama Data	Rasio Nilai aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dari Indeks Sistem Merit
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Mengukur tingkat capaian pengelolaan manajemen ASN pada aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Nilai indeks sistem merit aspek Perencanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian}}{\text{Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	<p>Nilai indeks sistem merit aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian</p> <p>Nilai keseluruhan indeks sistem merit aspek Perencanaan, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian</p>
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Inventarisasi bukti pendukung pelaksanaan sistem merit dan pengolahan data berbasis aplikasi
Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit	
Kode Data	-
Nama Data	Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Rasio nilai aspek Kompetensi dari Indeks Sistem Merit untuk mengukur tingkat capaian pengelolaan Manajemen ASN aspek Pengembangan Kompetensi
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	

	$\frac{\text{Nilai Indeks Sistem Merit aspek pengembangan kompetensi}}{\text{Nilai keseluruhan Indeks Sistem Merit Aspek pengembangan kompetensi}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai Indeks Sistem Merit aspek pengembangan kompetensi Nilai keseluruhan Indeks Sistem Merit Aspek pengembangan kompetensi
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Inventarisasi bukti pendukung pelaksanaan sistem merit dan pengolahan data berbasis aplikasi
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Nilai Rata - rata hasil Survei kepuasan masyarakat dalam 1 tahun
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai Rata - rata hasil Survei kepuasan masyarakat dalam 1 tahun
Ukuran	Nilai
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survei melalui aplikasi e-sukma - Mengolah data hasil laporan - Menampilkan data laporan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
Kode Data	-
Nama Data	Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Konsep/Definisi	Nilai SAKIP merupakan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Variabel Pembentuk Indikator	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Ukuran	Nilai
Satuan	Angka
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Kompilasi. Data hasil review pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh inspektorat

3.26 INSPEKTORAT

Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Pengawasan
Konsep/Definisi	Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti merupakan jumlah temuan Atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh APIP telah diberikan tanggapan oleh obyek pemeriksaan
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindak lanjuti}}{\text{Total temuan}} 100\%$

Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti Total temuan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan
Persentase Perangkat Daerah yang Didampingi	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Perangkat Daerah yang Didampingi
Unit Kerja Penghasilan	Bidang Pengawasan
Konsep/Definisi	Persentase perangkat daerah yang didampingi merupakan perangkat daerah yang didamping, ada permintaan pengawasan dari OPD dalam rangka peningkatan tatakelola pemerintahan.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang didampingi}}{\text{Total perangkat}} 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah perangkat daerah yang didampingi Total perangkat daerah
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Enam bulan
Metode Pengumpulan Data	Sensus, metode pengumpulan data dengan mengambil seluruh objek yang menjadi anggota populasi sebagai bahan kajian atau pengamatan

3.27 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembinaan Tentang Wawasan Kebangsaan	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Masyarakat yang Mendapat Pembinaan Tentang Wawasan Kebangsaan
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Konsep/Definisi	Keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus di akui, diterima, dihormati dan dijaga serta

	<p>diikat oleh suatu identitas bersama. Oleh Karena itu, demi mewujudkan bangsa dan kenegaraan yang berkaitan dengan dasar negara pancasila konstitusi negara yaitu UUD Tahun 1945 bentuk negara yaitu Negara Kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika jika sebagai semboyan wawasan kebangsaan kita, konsepsi kebangsaan tersebut mencerminkan karakter yang diwujudkan dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh kemajuan yang ada di wilayah negara kepulauan ini. Wawasan ini sangat penting karena merupakan bentuk pengokohan eksistensi sebagai bangsa yang kuat, bersatu dan berdaya saing serta terjaganya sejarah dan kecintaan terhadap tanah air. Dengan latar belakang fenomena bahwa kehidupan bermasyarakat, bernegara di Indonesia secara alamiah mengalami suatu pergeseran atau perubahan yang signifikan dari semua sendi kehidupan. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka masyarakat perlu memiliki pemahaman bahwa negara kesatuan RI memiliki ciri khas kebhinekaan, ras, suku Budaya dan Agama</p>
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan Jumlah penduduk
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan bulanan
Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Dalam Bidang Politik

Unit Kerja Penghasilan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Konsep/Definisi	Peran partai politik sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik. Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalonkan melalui pemilihan umum (pemilu) untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislative atau eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik}}{\text{Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih}} 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Persentase Ormas yang Mendapat Predikat Baik	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Ormas yang Mendapat Predikat Baik
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Konsep/Definisi	Bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013, Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan

	Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya dari pemerintah agar ormas sebagai mitra pemerintah dapat bersinergi dalam pembangunan sehingga dapat meningkatkan dan memperluas partisipasi Ormas tersebut demi tercapainya sasaran pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ormas yang berbadan hukum}}{\text{Jumlah ormas keseluruhan}} 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah ormas yang berbadan hukum Jumlah ormas keseluruhan
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan
Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah	
Kode Data	-
Nama Data	Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah
Unit Kerja Penghasilan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
Konsep/Definisi	Dengan banyaknya potensi konflik yang menonjol pada tingkat Propinsi/ Kab /Kota yang berlatar belakang pada permasalahan yang berkaitan dengan Poleksosbud, SARA, sengketa batas wilayah, yang seringkali berubah menjadi tindakan kekerasan bahkan anarkis, yang akan berpotensi mengakibatkan disintegrasi bangsa, maka perluantisipasi tindakan untuk mencegah, menanggulangi guna terpelihara keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Reupublik Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengendalikan , penghentian dan pemulihan pasca konflik dengan dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten tahun 2022.
Level Estimasi	Kabupaten/Kota
Rumus Perhitungan	

	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah potensi konflik yang ada}} \times 100\%$
Variabel Pembentuk Indikator	Jumlah potensi konflik yang terfasilitasi Jumlah potensi konflik yang ada
Ukuran	Persentase
Satuan	Persen
Referensi Waktu	Tahunan
Metode Pengumpulan Data	Laporan tahunan

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Disusunnya buku Metadata yang menghimpun dokumentasi kegiatan statistik ini merupakan bentuk perwujudan dari Peraturan Presiden no.39 Tahun 2019 untuk mewujudkan wadah yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Tentunya publikasi ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat baik itu untuk BPS sebagai penghimpun data maupun pemangku kebijakan yang mengakses. Selain itu, publikasi ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kegiatan statistik baik itu di lingkup sektoral maupun pusat.

4.1 KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengumpulan data metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus tahun 2021 yaitu:

- a. Pelaksanaan penghimpunan dokumentasi kegiatan statistik di Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 April 2023 dapat terlaksana dengan baik. Sebagian besar metadata sudah dapat terkumpul dan dihimpun dalam buku ini.
- b. Ditemukan sebuah permasalahan dimana terdapat perbedaan perwakilan OPD yang hadir ketika rapat koordinasi dan waktu pengambilan data sehingga muncul beberapa miskomunikasi.
- c. Diperlukan koordinasi yang lebih intens antara BPS dan OPD untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan terhindar dari miskomunikasi dalam pengumpulan data.

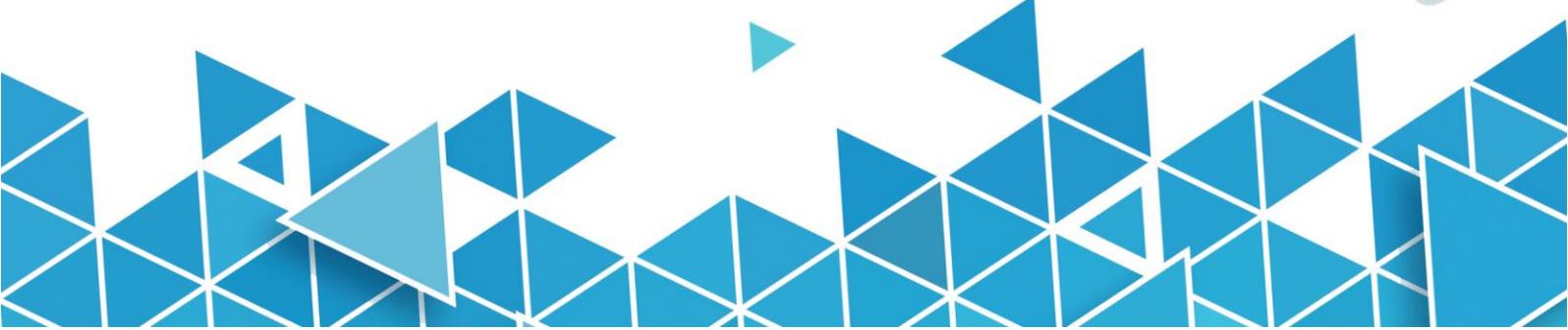
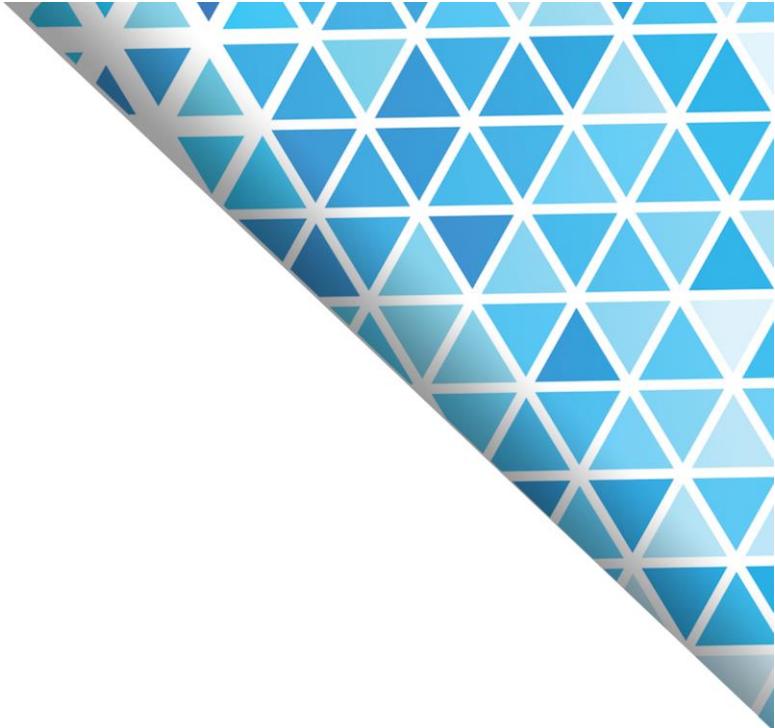
4.2 SARAN

Melalui proses perancangan publikasi ini, ditemukan beberapa poin yang dapat membantu meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan di kemudian hari. Adapun beberapa poin tersebut adalah:

- a.** Untuk mengatasi permasalahan terkait bedanya perwakilan yang datang antara rapat koordinasi dan waktu pengumpulan data, perlu dilakukan konfirmasi awal terkait siapa yang akan melaporkan dalam pengumpulan data.
- b.** Diperlukan komunikasi yang lancar pada masing – masing OPD terlebih dalam urusan delegasi agar kerja dapat tersampaikan dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, A. (2017). Esensi statistik bagi kebijakan publik. Bogor: In Media.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. (n.d.). Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pacitan 2016. BPS Kabupaten Pacitan. <https://pacitankab.bps.go.id/indicator/153/67/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pacitan.html>
- BigBox. (2020). Satu Data Indonesia & Manfaatnya bagi Pemerintah Indonesia. Diakses dari <https://bigbox.co.id/blog/satu-data-indonesia-manfaatnya-bagi-pemerintah/>
- Dippo C., S. (2000). The Role of Metadata in Statistics. U. S. Bureau of Labor Statistics and Bo Sundgren
- Legwaila, S. (2010). A model data producer: the importance of sound metadata management–Botswana’s case. *IPM17: Implementing the 1993 System of National Accounts*, 57.
- Management of Statistical Metadata at the OECD. (2006). Retrieved from <https://www.oecd.org/sdd/33869551.pdf>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 16 TAHUN 1997. TENTANG. STATISTIK.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Peraturan Presiden No. 39/2019
- Sekretariat Satu Data Indonesia. (2020). Tentang Satu Data Indonesia. Diakses dari <https://satudata.go.id/tentang>



-
-
-
-

DATA MENCERDASKAN BANGSA

-
-
-
-



Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pacitan